



# RENSTRA

# DPPPA 2025-2029

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

-  DP3A Provinsi Kaltim
-  @dp3a.kaltim
-  dp3akaltim@gmail.com
-  [www.dp3a.kaltimprov.go.id](http://www.dp3a.kaltimprov.go.id)



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

## BAB II MUATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup :

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kinerja, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi, arah kebijakan, dan program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

## BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I. Pendahuluan;
  - b. BAB II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

- c. BAB III. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
  - d. BAB IV. Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - e. BAB V. Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pemuda dan Olahraga
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- s. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- t. Dinas Pariwisata;
- u. Dinas Perkebunan;
- v. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- w. Dinas Kehutanan;
- x. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

- aa. Sekretariat Daerah
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda, untuk dilakukan penyampaian rekomendasi oleh Kepala Bappeda.

#### BAB V

#### PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
  - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun, kecuali terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2025


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Timur disusun berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang ini menjadi landasan bagi struktur dan fungsi pemerintahan daerah, termasuk kewajiban penyusunan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra). Pada tahun 2025 penyusunan Renstra perangkat daerah di Kalimantan Timur mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku DPPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim menyusun Rencana Strategis DPPPA Prov. Kaltim Tahun 2025-2029 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program serta kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan bersifat Indikatif untuk masa Kerja 5 (lima) tahun mendatang.

Dokumen ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi DPPPA Prov. Kaltim beserta jajarannya dalam menyusun Rencana Kerja tahunan. Dokumen ini menjadi penting karena DPPPA Prov. Kaltim beserta jajarannya harus bertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.

Samarinda, 7 November 2025

Kepala Dinas,



Norwani Sorayalita, SE, MMT  
Pemina Utama Madya

NIP. 19651215 198601 2 002



# **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>VI</b>
<b>Bab I PENDAHULUAN</b>	
1.1 . Latar Belakang.....	1
1.2 . Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 . Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 . Sistematika Penulisan.....	7
<b>Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 . Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	48
2.2 . Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	49
2.2.2 Isu Strategis.....	54
<b>Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	55
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	56
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	57
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	66



## **Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**

### **PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Uraian Program.....	72
4.2 Uraian Kegiatan.....	73
4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.....	96
4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	113
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah .....	114
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	115

## **Bab V PENUTUP**



## D A F T A R G A M B A R

Gambar 2.1	
Struktur Organisasi DPPPA Prov. Kaltim.....	13
Gambar 2.2	
Capain IPG Kalimantan Timur.....	26
Gambar 2.3	
Indeks Ketimpangan Gender Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	28
Gambar 2.4	
Capaian ARG Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	30
Gambar 2.5	
Data Kekerasan Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	32
Gambar 2.6	
Persentase jumlah kekerasan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin Kalimantan Timur tahun 2024.....	33
Gambar 2.7	
Persentase jumlah kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan Kalimantan Timur tahun 2024.....	34
Gambar 2.8	
Capaian IPA dan IPHA Kalimantan Timur tahun 2021-2023.....	37
Gambar 2.9	
Indikator dan dimensi penyusunan Indeks Kualitas Keluarga (IKK).....	38
Gambar 2.10	
Capaian indicator dan dimensi Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Kalimantan Timur tahun 2022-2023.....	39
Gambar 2.11	
Proyeksi jumlah laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk Kalimantan Timur tahun 2025-2029.....	41
Gambar 2.12	
Proyeksi jumlah penduduk, menurut kelompok umur Kalimantan Timur tahun 2025-2029.....	42
Gambar 2.13	
Capaian nilai SAKIP DPPPA Prov. Kaltim Tahun 2020-2024.....	47



Gambar 2.14	
Capaian nilai indeks kepuasan masyarakat DPPPA Prov. Kaltim tahun 2020-2024.....	48
Gambar 3.1	
Konsep Renstra Perangkat Daerah .....	63
Gambar 3.2	
Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	63



## **DAFTAR TABEL**

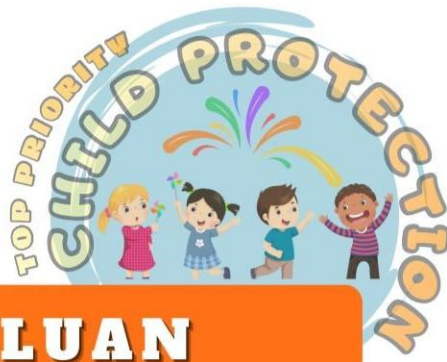
Tabel 2.1	
Jumlah Pegawai DPPPA Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	14
Tabel 2.2	
Jumlah Pegawai DPPPA Berdasarkan Golongan .....	15
Tabel 2.3	
Jumlah Pegawai P3K DPPPA Berdasarkan Golongan .....	15
Tabel 2.4	
Jumlah sarana dan prasarana berdasarkan kondisi di DPPPA .....	16
Tabel 2.5	
Pencapaian Aset DPPPA berdasarkan Rekapitulasi Neraca Barang.....	16
Tabel 2.6	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Capaian IKU DPPPA Prov. Kaltim Tahun 2020-2024 .....	18
Tabel 2.7	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Capaian IKD RPD Provinsi kaltim Tahun 2014-2026.....	20
Tabel 2.8	
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPPA Prov. Kaltim Tahun 2021-2023.....	21
Tabel 2.9	
IPG berdasarkan Kabupaten/Kota Kalimantan Timur tahun 2020-2024.....	27
Tabel 2.10	
IKG berdasarkan Kabupaten/Kota Kalimantan timur tahun 2020-2024.....	28
Tabel 2.11	
Jumlah kasus berdasarkan Kabupaten/Kota Kalimantan timur tahun 2020-2024.....	32
Tabel 2.12	
Jumlah penduduk Kalimantan timur menurut Kabupaten/Kota tahun 2020-2024.....	40
Tabel 2.13	
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, sex ratio dan kepadatan penduduk menurut Kabupaten/Kota Kalimantan Timur tahun 2024.....	41



Tabel 2.14	
Targer TFR dan mCPR Kalimantan timur tahun 2020-2024.....	43
Tabel 2.15	
Tabel ASFR dan unmetneed Kalimantan Timur tahun 2020-2024.....	44
Tabel 2.16	
Target indikator pembangunan keluarga (iBangga) Kalimantan timur tahun 2020-2024.....	45
Tabel 2.17	
Identifikasi permasalahan .....	49
Tabel 2.18	
Faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. ....	51
Tabel 2.19	
Teknik Menyimpulkan Isu strategis DPPPA Provinsi Kaltim. ....	54
Tabel 3.1	
Target tujuan DPPPA tahun 2025-2030 .....	55
Tabel 3.2	
Realisai Kinerja Tujuan DPPPA Tahun 2020-2024.....	56
Tabel 3.3	
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	64
Tabel 3.4	
Penahapan Pembangunan Renstra DPPPA Provinsi Kaltim 2025-2029.....	65
Tabel 3.5	
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	65
Tabel 3.6	
Lokus Pelasanaan Renstra DPPPA Provinsi Kaltim Tahun 2025-2030.....	65
Tabel 4.1	
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan PD.....	74
Tabel 4.1	
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPPPA Prov. Kaltim tahun 2025-2029.....	76
Tabel 4.2	
Matriks rencana program /kegiatan/ sub kegiatan dan pendanaan Pemerintah Prov. Kaltim.....	96



Tabel 4.3	
Daftra Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas	
Pembangunan Daerah.....	113
Tabel 4.4	
Target Program Prioritas DPPPA Prov. Katim.....	114
Tabel 4.5	
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah .....	115
Tabel 4.6	
Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPPPA Prov. Kaltim tahun 2025-2030.....	116



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. 1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur. DPPPA Provinsi Kalimantan Timur mengampu urusan dua urusan yaitu 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, hal ini tertulis sebagai Urusan yang menjadi tanggung jawab daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan tersebut merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan melalui Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan melalui Pembangunan Responsif Gender bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender di semua sektor pembangunan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 DPPPA Provinsi Kalimantan Timur mendukung pencapaian Visi RPJMD ***"Kalim Sukses Menuju Generasi Emas"*** dengan Misi ***"Mewujudkan Pemberdayaan Manusia yang Unggul dan Sejahtera"*** yang tertuang pada Tujuan 2 RPJMD yakni Terbangunnya Generasi Emas dengan Sasaran 7 RPJMD yakni Meningkatkan Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia".



Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPPA Provinsi Kalimantan Timur merumuskan tujuan pada Dokumen Renstra DPPPA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dengan rumusan tujuan **“Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta keluarga yang berkualitas”** yang akan dicapai melalui sasaran kinerja.

Dalam penyusunan Renstra DP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 serta dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra DPPPA Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2025–2029 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah..

Selanjutnya, penyusunan Renstra DPPPA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional dalam hal ini RPJMN, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra BKKBN, di tingkat Provinsi yakni RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra DPPPA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan isu strategis pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian



Penduduk dan Keluarga Berencana. Berdasarkan hal tersebut maka DPPPA Provinsi Kaltim beserta seluruh jajaran menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029, yang merupakan tindak lanjut dari Penyusunan RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kondisi dan potensi daerah.

Renstra DPPPA Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang didalamnya memuat capaian kinerja yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Renja tersebut disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sekaligus menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

## **I. 2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Landasan hukum penyusunan Renstra DPPPA Provinsi. Kaltim Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945 Pasal 27 dan 28;
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);



5. Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah No.86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



14. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 90 tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Janga Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
20. Peraturan Daerah Provinsi. Kaltim No. 1 tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsiinsi Kalimantan Timur;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis PPPA Pada Dinas DPPPA Provinsi. Kaltim;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kalimantan Timur;



24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **I. 3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Renstra DPPPA Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran DPPPA Provinsi Kaltim untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2025-2029) yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi. Kaltim Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi DPPPA Anak Provinsi Kaltim.

Tujuan dari penyusunan Renstra DPPPA Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPPA Provinsi. Kaltim dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Kaltim;
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DPPPA Provinsi. Kaltim;
3. DPPPA Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Renja DPPPA Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029;
5. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DPPPA Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;



6. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Renja DPPPA Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029.

#### **I. 4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra DPPPA Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra perangkat daerah.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang gambaran pelayanan perangkat daerah yang meliputi tugas fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan dan kelompok sasaran perangkat daerah serta permasalahan serta isu strategis perangkat daerah.

##### **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah.

##### **Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang uraian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah serta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja utama dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja kunci.

##### **Bab V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan penting substansial kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN DAN ISU STRATEGIS



### II. 1 GAMBARAN PELAYANAN

#### A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

##### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kualitas hidup perempuan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga;



- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- j. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- k. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- l. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

## **2. Sekretaris**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan dan pengelolaan aset, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
- d. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya; dan
- e. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.



### **3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan**

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang kualitas hidup perempuan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesetaraan Gender menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kualitas hidup perempuan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan program bidang kualitas hidup perempuan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kualitas hidup perempuan;
- d. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang kualitas hidup perempuan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup perempuan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

### **4. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga**

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga;
- b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan program bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemenuhan hak anak;



- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kualitas keluarga;
- e. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga; dan
- g. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak**

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan program di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- c. penyiapan, pembinaan, pengendalian dan pengaturan teknis perlindungan perempuan;
- d. penyiapan, pembinaan, pengendalian dan pengaturan teknis perlindungan khusus anak;
- e. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak; dan



- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

## **6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan program di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- c. penyiapan, pembinaan, pengendalian dan pengaturan teknis pengendalian penduduk;
- d. penyiapan, pembinaan, pengendalian dan pengaturan teknis keluarga berencana;
- e. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

## **7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)**

UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung



jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan :

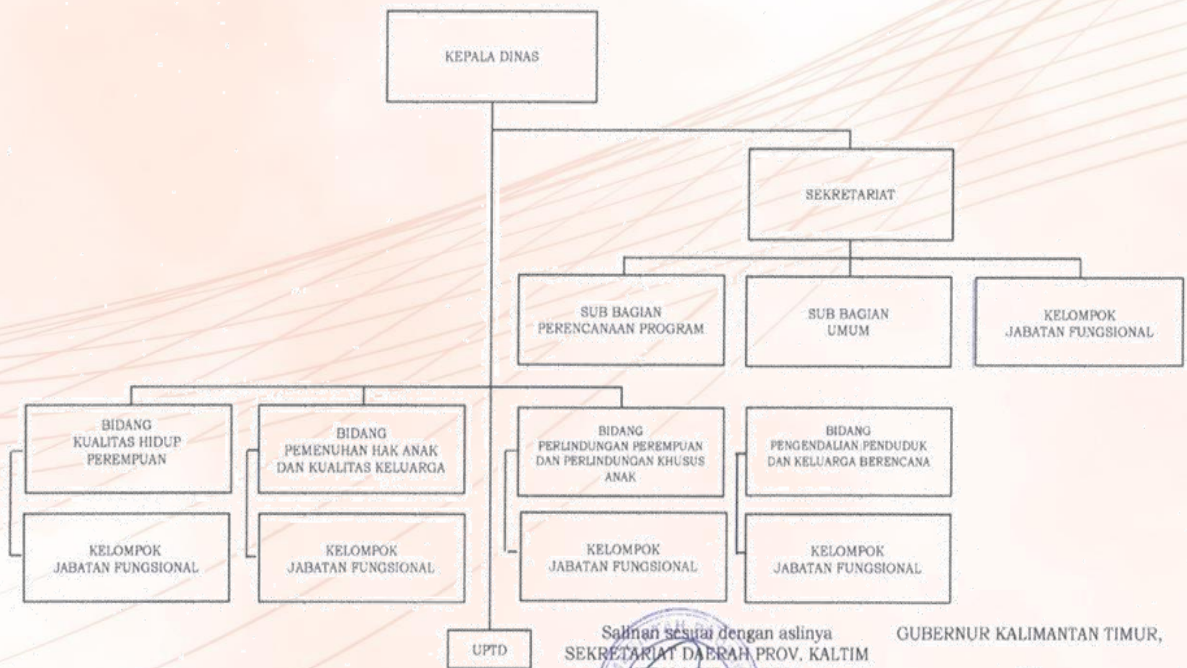
- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban

## B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi DPPPA Provinsi Kaltim disusun berdasarkan Pergub Kaltim No. 43 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja DPPPA Provinsi Kaltim sesuai gambar dibawah ini :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi DPPPA Provinsi Kaltim



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
SEKRETARIAT DAERAH  
3  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,  
ttd  
ISRAN NOOR



## B. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Pegawai di lingkungan DPPPA Provinsi Kaltim berjumlah 59 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 33 orang, P3K 19 orang dan Non ASN 7 orang. Pegawai ASN terdiri dari 14 orang Laki-Laki dan 19 orang Perempuan. Tingkat pendidikan pegawai merupakan sumber daya yang dimiliki organisasi, dengan memperhatikan tingkat pendidikan dan golongan pegawai mempermudah penempatan berdasarkan kebutuhan, kesesuaian tugas dan peran pegawai guna pencapaian kinerja secara efektif, efisien dengan memperhatikan pengembangan kompetensi setiap pegawai. Data pegawai DPPPA Provinsi Kaltim tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai DPPPA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		P3K		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1.	SLTA Sederajat	1		5		1		7
2.	D3		2	1	1			4
3.	D4	1	2			1		4
4.	S1	4	9	8	4	2	3	28
5.	S2	10	7					16
6.	S3							
Total		16	20	14	5	4	3	62

*Sumber Data : DPPPA Provinsi Kaltim per 30 Oktober 2025*

Pegawai ASN dikategorikan ke dalam empat golongan, dengan setiap golongan memiliki beberapa tingkatan pangkat. Penentuan golongan dan pangkat bergantung pada tingkat pendidikan dan masa kerja, di mana pendidikan yang lebih tinggi umumnya menghasilkan golongan yang lebih tinggi. Adapun data pegawai ASN DPPPA Provinsi Kaltim berdasarkan golongan tersaji dalam table berikut :



Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai PNS DPPPA Berdasarkan Golongan

No	Golongan	PNS		Jumlah
		L	P	
1.	Eselon II		1	1
2.	Eselon III	3	3	6
3.	Eselon IV	4	1	5
4.	Pejabat Fungsional	7	3	10
5.	Pelaksana	2	12	14
Total		16	20	36

*Sumber Data : DPPPA Provinsi Kaltim per 30 Oktober 2025*

Sedangkan golongan P3K ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan dan jabatan fungsional yang dipegang, dengan rincian umum seperti SD masuk golongan I, SMP golongan IV, SMA/D1 golongan V, D2 golongan VI, D3 golongan VII, S1/D4 golongan IX, S2 golongan X, dan S3 golongan XI atau XII. Penetapan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB). Jumlah P3K DPPPA Berdasarkan Golongan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai P3K DPPPA Berdasarkan Golongan

No	Golongan	P3K		
		L	P	
1.	V	5		5
2.	VII	1	1	
3.	IX	8	4	1
Total		14	5	19

*Sumber Data : DPPPA Provinsi Kaltim per 30 Oktober 2025*



## 2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan Prasarana DPPPA Provinsi Kaltim merupakan pendukung dalam mencapai target pekerjaan dan terselenggaranya kegiatan. Sarana prasarana dan kondisinya yang dimiliki DPPPA Provinsi Kaltim Tahun 2025 selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel 2.4  
Jumlah sarana dan prasarana berdasarkan kondisi di DPPPA

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Gedung A & Halaman	√	√	1
2.	Gedung B	√	√	1
3.	Gedung C	√	√	1
4.	Kendaraan Roda 4	√		19
5.	Kendaraan Roda 2	√		11

Sumber Data : DPPPA Provinsi Kaltim per 30 Oktober 2025

Sedangkan kondisi aset tetap sebagai penunjang operasional dengan jumlah aset sebesar Rp.45.603.246.507,- sesuai penutupan neraca per 31 Desember 2024 sesuai table berikut :

Tabel 2.5  
Jumlah Aset DPPPA berdasarkan Rekapitulasi Neraca Barang

Kode	Uraian	Nilai (Rp.)
<b>1.3</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>45.603.246.507,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Tanah</b>	<b>5.124.576.000,00</b>
1.3.1.01	Tanah	5.124.576.000,00
<b>1.3.2</b>	<b>Peralatan Dan Mesin</b>	<b>9.975.992.407,00</b>
1.3.2.01	Alat Besar	59.450.000,00
1.3.2.02	Alat Angkutan	3.813.635.399,00
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	13.956.000,00
1.3.2.04	Alat Pertanian	0,00
1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	2.112.341.000,00
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	528.698.300,00
1.3.2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	0,00
1.3.2.08	Alat Laboratorium	313.130.000,00
1.3.2.09	Alat Persenjataan	0,00
1.3.2.10	Komputer	3.100.981.708,00



Kode	Uraian	Nilai (Rp.)
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	0,00
1.3.2.12	Alat Pengeboran	0,00
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0,00
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	17.600.000,00
1.3.2.16	Alat Peraga	0,00
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	1.400.000,00
1.3.2.18	Rambu - Rambu	0,00
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	14.800.000,00
<b>1.3.3</b>	<b>Gedung Dan Bangunan</b>	<b>29.816.901.600,00</b>
1.3.3.01	Bangunan Gedung	29.816.901.600,00
1.3.3.02	Monumen	0,00
1.3.3.03	Bangunan Menara	0,00
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00
<b>1.3.4</b>	<b>Jalan, Jaringan Dan Irigasi</b>	<b>661.033.000,00</b>
1.3.4.01	Jalan Dan Jembatan	661.033.000,00
1.3.4.02	Bangunan Air	0,00
1.3.4.03	Instalasi	0,00
1.3.4.04	Jaringan	0,00
<b>1.3.5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>24.743.500,00</b>
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	24.743.500,00
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00
1.3.5.03	Hewan	0,00
1.3.5.04	Biota Perairan	0,00
1.3.5.05	Tanaman	0,00
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	0,00
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
1.5.2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00
1.5.2.01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	196.426.000,00
1.5.3.01	Aset Tidak Berwujud	196.426.000,00
1.5.4	Aset Lain-Lain	0,00
1.5.4.01	Aset Lain-Lain	0,00

Sumber Data : DPPPA Provinsi Kaltim per 31 Juli 2025



### C. KINERJA PELAYANAN

Kinerja Pelayanan DPPPA Provinsi Kaltim merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat dari kinerja capaian indikator utama dan kinerja anggaran yang selengkapnyanya masing masing dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
DPPPA Provinsi Kaltim Tahun 2020 - 2024

Indikator Sasaran	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Rasio					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	74,00	78,00	89,00	90,00		94,86	75,68	93,58	100,00		128,19	97,03	105,15	111,11		Data Renstra 2018-2023
Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG)	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	60,00	65,00	85,00	100,00		29,00	72,97	86,49	83,78		48,33	112,26	101,75	83,78		
Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	98,00	99,00	100,00	100,00		98,00	100,00	100,90	99,80		100,00	101,01	100,90	99,80		
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	3,67	2,54	2,52	2,50		3,67	2,54	2,33	1,65		100,00	100,00	92,46	66,00		
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender	%	35,00	40,00	45,00	50,00		61,11	40,00	65,00	65,00		174,60	100,00	144,44	130,00		



Indikator Sasaran	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Rasio					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana	Persentase capaian kinerja aparatur sipil negara DKP3A	%	100,00	100,00	100,00	100,00		80,44	70,00	96,84	96,20		80,44	70,00	96,84	96,20		
Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan	%					50					33,33					66,66	
Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan hak anak di Prov. Kaltim	Ratio kekerasan terhadap perempuan, termaksud TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan)	Ratio					23,46					47,67					203,20	
	Ratio kekerasan terhadap anak (Per 10.000 penduduk anak)	Ratio					0,2					0,51					255,00	
Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Persentase ketersediaan data terpilah gender dan anak pada perangkat daerah	%					75					75					100,00	
Meningkatkan kualitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Jumlah lembaga (PEKA yang terstandarisasi)	Jumlah Lembaga					2					3					150,00	
	Jumlah PEKA yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah Orang					400					400					100,00	
Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%					2,53					2,53					100,00	

Data Renstra 2024-2026



Tabel 2.7  
Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)  
Rencana Pembangunan (RPD) Provinsi Kaltim Tahun 2024-2026

Indikator Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	14	15	16	28,67			204,79		
Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan hak anak di Prov. Kaltim	Ratio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Ratio	2	1,99	1,98	0,51			25,50		
	Ratio kekerasan terhadap perempuan, termaksud TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan)	Ratio	23,46	23,23	23,11	47,67			203,20		
Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	Penyajian data kependudukan skala Provinsi	%	100	100	100	100			100,00		
	Pemanfaatan data kependudukan	%	38,23	44,11	50	33,33			87,18		
Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,04	2,02	2,01	2,17			106,37		
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	67,98	68,01	68,23	55,71			81,95		
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,54	7,38	7,24	25,86			342,97		



**Tabel 2.8**  
**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPPA Provinsi Kaltim Tahun 2021-2024**

Uraian Kegiatan	Anggaran			Realisasi				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	454.075.375	312.000.000	633.120.000	369.694.491	296.058.533	630.713.866	571.826.706	81,42	94,89	99,62	96,10	466.398.458	332.876.512
Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	9.344.839.000	10.066.815.169	10.609.000.521	7.890.221.225	9.286.057.484	9.805.561.494	12.244.979.465	84,43	92,24	92,43	96,81	10.006.884.897	8.588.139.355
Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah		573.320.000	707.306.500		540.222.006	690.630.169	885.027.229	0,00	94,23	97,64	88,70	426.875.500	270.111.003
Administrasi Umum Perangkat Daerah	989.167.624	2.576.398.294	2.122.979.400	938.989.590	2.564.038.523	2.200.622.000	3.264.714.220	94,93	99,52	99,19	96,23	1.896.181.773	1.751.514.057
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		724.225.000	534.482.000		695.924.000	504.381.974	1.071.155.000	0,00	96,09	94,27	88,89	419.569.000	347.962.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.137.648.540	2.235.083.296	2.750.611.360	1.736.289.915	2.106.436.602	2.760.579.800	3.591.911.039	81,22	94,24	95,95	92,33	2.374.447.732	1.921.363.259
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.571.183.635	335.494.000	1.161.906.500	1.163.129.305	306.350.787	624.645.217	491.004.450	74,03	91,31		52,91	1.022.861.378	734.740.046
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	300.000.000	654.998.600	950.000.000	228.408.016	640.314.445	945.824.878	1.151.047.848	76,14	97,76		92,50	634.999.533	434.361.231
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	250.000.000	459.242.000	350.000.000	199.212.509	452.934.003	345.659.459	736.263.364	79,69	98,63	98,76	93,02	353.080.667	326.073.256



Uraian Kegiatan	Anggaran			Realisasi				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi													
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	449.325.201	442.401.400	400.000.000	370.885.826	430.906.065	397.640.578	1.900.849.425	82,54	97,40	99,41	85,83	430.575.534	400.895.946
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	179.310.000	455.590.000	741.300.000	152.191.138	378.662.731	1.345.623.137	1.075.596.241	84,88	83,11	81,99	78,00	458.733.333	265.426.935
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	563.359.625	262.044.000	1.154.504.000	252.098.905	220.652.367	1.082.286.781	565.681.505	44,75	84,20	93,74	93,90	659.969.208	236.375.636
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi	205.425.000	76.806.000	74.596.000	175.853.725	71.411.000	71.120.000	766.763.034	85,60	92,98		89,02	118.942.333	123.632.363
Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan	500.000.000	742.050.000	692.400.000	477.025.547	725.594.679	681.069.384	845.963.848	95,41	97,78	98,36	88,36	644.816.667	601.310.113



Uraian Kegiatan	Anggaran			Realisasi				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Data di Tingkat Daerah Provinsi													
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	59.575.000	952.594.000	235.000.000	54.093.000	905.813.420	268.343.509	952.060.789	90,80	95,09	97,72	84,19	415.723.000	479.953.210
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	8.315.425.000	150.936.000	196.400.000	1.803.730.870	142.433.661	184.862.905	806.883.656	21,69	94,37	94,13	97,22	2.887.587.000	973.082.266
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	212.820.000	336.000.000	194.855.200	208.038.935	293.424.274	466.349.970	77,94	97,75	87,33	82,38	266.273.333	201.447.068
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	225.000.000	733.680.000	880.000.000	194.024.198	338.577.298	842.330.404	278.550.800	86,23	46,15		93,14	612.893.333	266.300.748
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	4.680.000.000	2.020.368.599	624.150.000	3.951.600.510	1.909.243.870	1.595.591.384	1.532.414.499	84,44	94,50	98,24	98,20	2.441.506.200	2.930.422.190
Pelayanan Pencatatan Sipil	170.000.000	222.203.000	278.000.000	115.369.284	220.953.230	275.502.763	206.983.770	67,86	99,44		91,30	223.401.000	168.161.257
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.476.175.000	574.462.401	498.000.000	1.091.734.499	569.345.532	492.073.798	476.673.662	73,96	99,11	98,81	90,89	849.545.800	830.540.016



Uraian Kegiatan	Anggaran			Realisasi				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	150.000.000	271.200.000	1.277.400.000	138.996.176	269.767.212	1.357.195.654	344.906.060	92,66	99,47	98,53	92,42	566.200.000	204.381.694
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	150.000.000	594.359.980	877.500.000	123.791.749	572.418.059	975.673.425	1.091.875.832	82,53	96,31	94,96	94,58	540.619.993	348.104.904
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	60.000.000	192.875.000	953.300.000	53.751.858	90.322.678	937.410.799	893.279.559	96,09	98,68		90,50	35.391.667	72.037.268
<b>JUMLAH</b>	<b>2.580.509.000</b>	<b>5.841.966.739</b>	<b>9.037.956.281</b>	<b>1.775.947.536</b>	<b>4.042.477.120</b>	<b>29.308.767.652</b>	<b>36.212.761.971</b>					<b>9.153.477.340</b>	<b>2.909.212.328</b>



Kinerja pelayanan DPPPA Provinsi Kaltim dapat dinikmati oleh publik dan menjadi bahan laporan dalam pencapaian kinerja meliputi beberapa bidang, yaitu:

## **1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan**

Beberapa aspek penting dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan diantaranya adalah Kesetaraan Akses pembangunan, Kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan tidak hanya menguntungkan perempuan itu sendiri, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Kesetaraan akses meliputi akses dalam bidang pendidikan dan kesehatan dimana Pendidikan adalah kunci untuk membuka peluang dan meningkatkan kemampuan perempuan dalam berbagai bidang sedangkan kesehatan memiliki arti bahwa dalam bidanh kesehatan Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk kesehatan reproduksi, sangat penting untuk kesejahteraan perempuan.

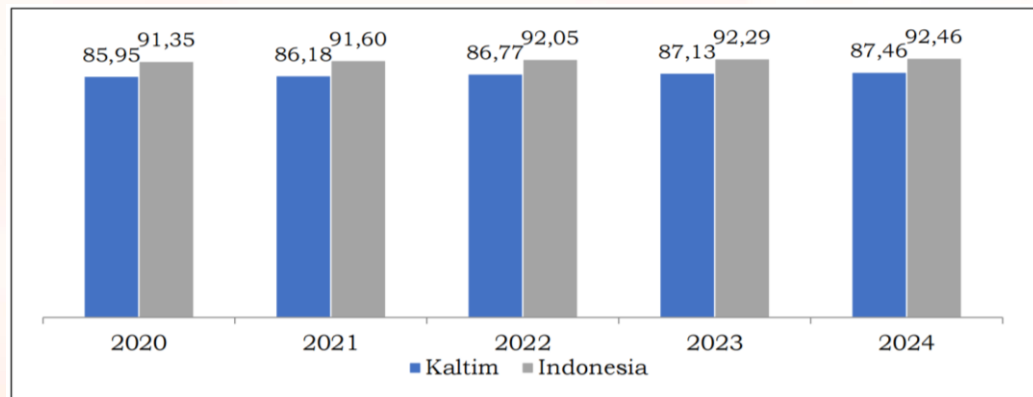
Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Beberapa aspek penting dalam peningkatan kesetaraan gender diantaranya meliputi aspek Penghapusan Diskriminasi dimana perlu upaya untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja dan dalam pengambilan keputusan, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah Perubahan Norma Sosial dimana Tantangan terbesar dalam pemberdayaan perempuan adalah mengubah norma sosial dan budaya yang menghambat partisipasi perempuan dalam pembangunan.

### **a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)**



Merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Index (HDI) pada tahun 2010. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Berikut grafik tabel capaian IPG Kaltim :

Gambar 2.2  
Capaian IPG Kalimantan Timur



Sumber data : BPS Kalimantan Timur 2025

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2020 mengalami peningkatan, namun masih berada dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2020 nilai IPG kalimantan Timur sebesar 85,95 dan meningkat menjadi 87,46 di tahun 2024. Dalam upaya untuk terus meningkatkan IPG di Kalimantan Timur, maka keseimbangan pada komponen peningkatan rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita perlu untuk menjadi perhatian. Adapun IPG Kabupaten/Kota terlihat dalam table berikut ini :



Tabel 2.9  
IPG Berdasarkan Kabupaten/Kota  
Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	71,35	71,49	71,27	73,15	74,03
2	Kutai Barat	84,09	84,67	85,02	85,73	86,23
3	Kukar Kartanegara	79,2	79,61	80,30	81,08	81,71
4	Kutai Timur	76,63	76,95	77,67	78,46	79,10
5	Berau	87,71	88,08	88,08	88,43	88,88
6	Penajam paser Utara	86,68	86,97	87,23	87,41	87,80
7	Mahakam Ulu	81,07	81,92	82,60	83,28	83,89
8	Balikpapan	90,24	90,48	90,59	90,80	91,04
9	Samarinda	89,82	89,9	90,40	90,68	91,01
10	Bontang	87,29	87,66	88,05	88,34	88,84
Kalimantan Timur		85,95	86,18	86,77	87,13	87,46

*Sumber data : BPS Kalimantan Timur tahun 2025*

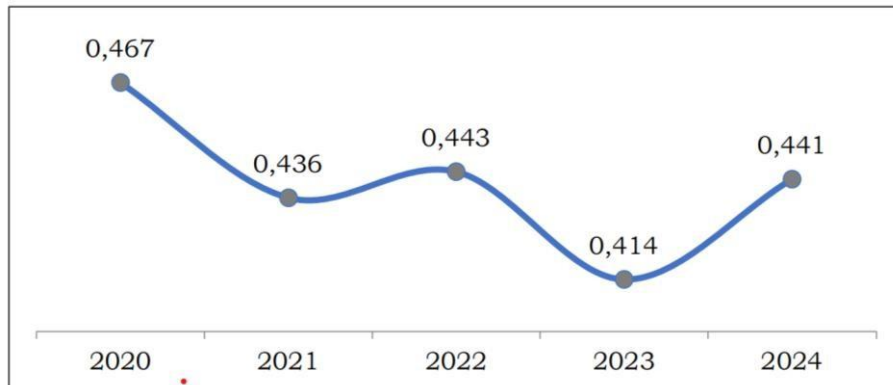
Kota Balikpapan memiliki Indeks Pembangunan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kaltim dengan capaian 91,04 sedangkan Paser memiliki Indeks pemberdayaan Gender terendah yaitu 74,03 yang artinya bahwa di Kabupaten Paser kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi. Rendahnya IPG di kabupaten Paser disebabkan oleh rendahnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan perempuan yang hanya sebesar 3,39 juta rupiah pada tahun 2024.

b. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

IKG adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi, yaitu: Kesehatan reproduksi, Pemberdayaan gender, Pasar tenaga kerja. IKG di Kaltim sejak tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan, meskipun terjadi kenaikan di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat perbaikan kesetaraan gender. Dengan kata lain, tingkat pencapaian kesetaraan gender di Kalimantan Timur relatif semakin baik.



Gambar 2.3  
Indeks Ketimpangan Gender  
Kalimantan Timur Tahun 2020-2024



Sumber data : BPS Kalimantan Timur tahun 2025

Berdasarkan gambar diatas Jika dibandingkan dengan nilai IKG tahun 2020, penurunan nilai IKG Provinsi Kaltim pada tahun 2024 dipengaruhi oleh adanya perbaikan di hampir seluruh indikator pada ketiga dimensi pembentuk. Pada tahun 2024, terdapat sedikit peningkatan nilai IKG yang terutama disebabkan oleh menurunnya persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif berdasarkan hasil Pemilihan Umum 2024, sedangkan indikator lainnya menunjukkan perbaikan, terutama pada dimensi tenaga kerja yang meningkat cukup signifikan.

Tabel 2.10  
IKG Berdasarkan Kabupaten/Kota  
Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	0,549	0,511	0,528	0,489	0,527
2	Kutai Barat	0,484	0,501	0,490	0,491	0,477
3	Kukar Kartanegara	0,556	0,511	0,540	0,490	0,439
4	Kutai Timur	0,530	0,518	0,552	0,532	0,517
5	Berau	0,493	0,467	0,380	0,502	0,421
6	Penajam paser Utara	0,438	0,572	0,527	0,544	0,474
7	Mahakam Ulu	0,406	0,449	0,421	0,362	0,339
8	Balikpapan	0,297	0,246	0,344	0,178	0,313
9	Samarinda	0,311	0,222	0,197	0,237	0,243
10	Bontang	0,235	0,348	0,253	0,314	0,313
Kalimantan Timur		0,467	0,436	0,443	0,414	0,441

Sumber data : BPS Kalimantan Timur tahun 2025



Pada tahun 2024, ketimpangan gender tertinggi terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan nilai 0,517, sedangkan ketimpangan gender terendah terdapat di Kota Samarinda dengan nilai 0,243. Rendahnya ketimpangan di Samarinda dipengaruhi oleh perbaikan dalam dimensi kesehatan reproduksi serta pasar kerja. Secara umum, jika dibandingkan antara kabupaten dan kota, terlihat bahwa IKG di wilayah kota cenderung lebih baik dibandingkan kabupaten. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pembangunan berbasis gender antara daerah perkotaan dan pedesaan di Kalimantan Timur.

c. Anggaran Responsif Gender (ARG)

Anggaran responsif gender adalah proses penganggaran yang memperhatikan aspek dan upaya untuk memajukan kesetaraan gender. Proses ini dilakukan dengan mempengaruhi proses penganggaran, alokasi sumber daya, pemantauan dan pelaporan dengan tujuan utama untuk memastikan dan merespon problem kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan penandaan ARG adalah proses identifikasi urusan, bidang urusan, program, kegiatan, sub-kegiatan, dan alokasi anggaran pada perangkat daerah yang mempunyai kontribusi terhadap peningkatan indikator kesetaraan dan keadilan gender. Proses penandaan anggaran responsif gender ini penting dengan beberapa manfaat strategis sebagai berikut:

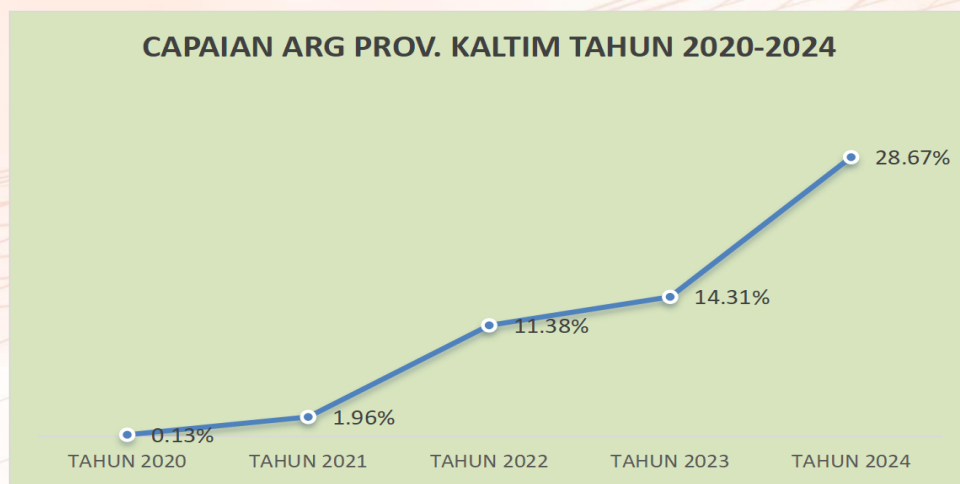
1. Untuk mengukur indikator komitmen dan kinerja memajukan kesetaraan gender. Melalui hasil penandaan anggaran responsif gender Pemerintah dapat memantau kinerja Belanja Daerah yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator pembangunan kesetaraan gender, baik jangka panjang dalam RPJPD jangka menengah dalam RPJMD maupun tahunan dalam RKPD.



2. Masukan strategis bagi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Kesetaraan Gender. Pemerintah Nasional dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan hasil Penandaan ARG sebagai basis penyusunan kebijakan pembangunan kesetaraan gender.
3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) aparatur. Implementasi penandanaan anggaran responsif gender membutuhkan kemampuan khusus bagi Kementerian/ Lembaga dan Perangkat Daerah dalam melakukan analisis gender dan identifikasi urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang berkontribusi terhadap indikator pembangunan gender seperti IPG dan IKG.
4. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas anggaran. Penandaan ARG menyaratkan adanya keterbukaan informasi data terpilah gender dan anggaran responsif gender sehingga ketepatan sasaran alokasi anggaran dapat dijamin dan diharapkan berdampak untuk memajukan kesetaraan gender.

Capaian nilai ARG Provinsi Kaltim dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yakni sejak tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.4  
Capaian ARG Kalimantan Timur Tahun 2020-2024



Sumber data : BPS Kalimantan Timur tahun 2025



## 2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Perlindungan perempuan dan anak menghadapi berbagai masalah, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan eksploitasi anak. Selain itu, ada juga masalah pernikahan dini, kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta diskriminasi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Provinsi Kaltim, sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi, menyadari pentingnya upaya perlindungan dan pencegahan yang lebih komprehensif.

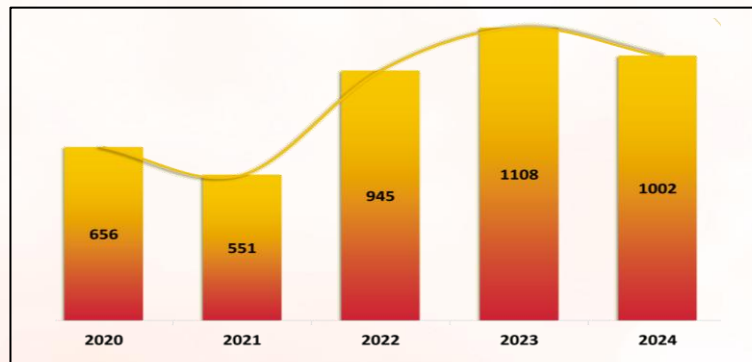
Menurut data Sistem Informasi Monitoring Fakta Kekerasan terhadap Perempuan dan anak (SIMFONI PPA), Provinsi Kaltim melaporkan terjadi 1.131 insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 168 korban adalah laki-laki, sedangkan 1.005 korban lainnya adalah perempuan. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Upaya perlindungan perempuan dan anak mencakup berbagai langkah untuk mencegah dan menangani kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap mereka. Ini melibatkan penguatan lembaga yang berwenang, peningkatan kesadaran masyarakat, penyediaan layanan yang responsif, serta penguatan peran keluarga dan komunitas.

Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan



Anak yang merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. Sebagai gambaran data jumlah kekerasan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir yakni sejak tahun 2020 -2024.

Gambar 2.5  
Data kekerasan Kalimantan Timur Tahun 2020-2024



Sumber data : Simfoni PPPA tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat perkembangan jumlah kasus kekerasan selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2020 - 2024, dimana pada tahun 2024 terdapat 1002 kasus kekerasan yang terjadi di provinsi Kalimantan Timur dari catatan tersebut kota Samarinda dan Kota Bontang memiliki jumlah kasus kekerasan yang cukup tinggi selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.11  
Jumlah kasus Berdasarkan Kabupaten/Kota Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

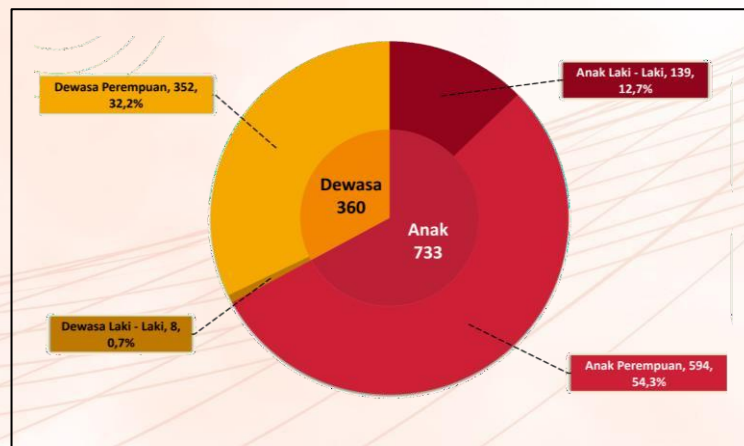
No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah Kasus	Sparklines
1	Paser	45	37	37	43	28	190	
2	Kutai Barat	28	13	28	57	62	188	
3	Kukar Kartanegara	33	27	77	113	141	391	
4	Kutai Timur	23	15	69	65	89	261	
5	Berau	31	13	37	67	70	218	
6	Penajam paser Utara	18	34	37	32	44	165	
7	Mahakam Ulu	0	0	5	1	7	13	
8	Balikpapan	52	66	80	135	177	510	
9	Samarinda	291	240	458	494	245	1728	
10	Bontang	135	106	117	101	139	598	

Sumber Data : Simfoni PPPA tahun 2024



Dari tabel diatas diperoleh gambaran bahwa pada beberapa kabupaten/kota terjadi peningkatan kasus kekerasan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, walaupun kota Samarinda dan Bontang masih yang tertinggi dalam jumlah kasus yang terjadi namun dalam beberapa tahun terdapat penurunan seperti kota Samarinda sempat mengalami penurunan yakni tahun 2021 dan tahun 2024, sementara kota bontang ditahun 2021 dan tahun 2023. Namun jika diperhatikan terdapat beberapa kabupaten yang memiliki kecenderungan mengalami peningkatan jumlah kasus kekerasan selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni kota Balikpapan, kabupaten Kukar, Kabupaten Kubar, dan Kabupaten Berau hal ini perlu untuk mendapatkan perhatian para pengambil kebijakan dan masyarakat agar dapat membuat langkah - langkah nyata dalam menekan/menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sementara berdasarkan data Simfoni PPPA diperoleh gambaran persentase jumlah korban kekerasan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin

Gambar 2.6  
Persentase Jumlah Kekerasan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin Kalimantan Timur Tahun 2024



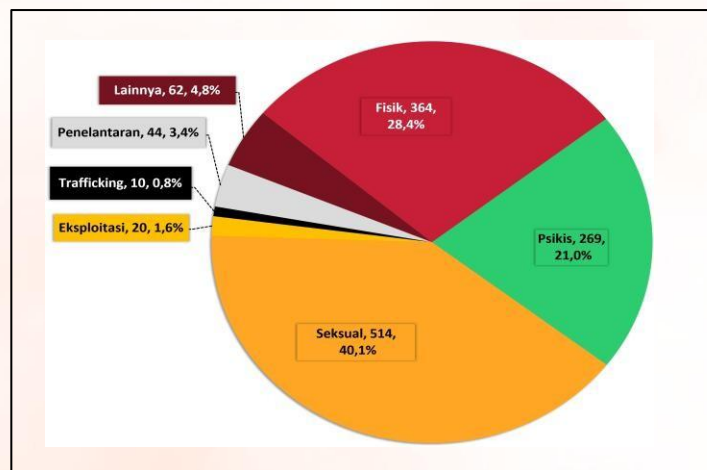
Sumber Data : Simfoni PPPA tahun 2024

Dari gambar diatas diperleh informasi jumlah kasus kekerasan terjadi sebanyak 1.093 kasus, dengan rincian dewasa sebanyak 360 korban dan anak sebanyak 733 korban, kemudian didapatkan pula data bahwa dari total korban dewasa yang terjadi terdapat 32.2% atau sebanyak 352 adalah korban perempuan dewasa, sementara rincian



anak adalah sebanyak 733 korban terdapat 54.3% atau sebanyak 594 korban adalah anak perempuan. Sementara itu, jika dilihat dari persentase dan jumlah korban berdasarkan bentuk kekerasan yang terjadi diperoleh gambaran sebagaimana terlihat dalam gambar 2.6 tentang persentase dan jumlah korban berdasarkan bentuk kekerasan yang terjadi di tahun 2024.

Gambar 2.7  
Persentase Jumlah Kekerasan berdasarkan Bentuk kekerasan Kalimantan Timur Tahun 2024



Sumber Data : Simfoni PPPA tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual dengan jumlah korban 514 orang atau 40.10%, kemudian kekerasan fisik dengan 364 korban atau 28.40%, kekerasan psikis 269 korban atau 21.00%. Upaya perlindungan perempuan dan anak mencakup berbagai tindakan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, Ini melibatkan penguatan lembaga perlindungan, peningkatan kesadaran masyarakat, pemberdayaan perempuan, serta penyediaan layanan yang responsif dan terintegrasi. Berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya adalah :

- a. Penguatan Lembaga:
  - Memperkuat peran Komnas Perempuan dalam advokasi, pemantauan, dan penelitian terkait kekerasan terhadap perempuan.



- Lembaga Perlindungan Anak: Memastikan keberadaan dan efektivitas lembaga yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan dan eksploitasi anak.
  - SIMFONI PPA Memanfaatkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) untuk pencatatan dan pelaporan kasus.
  - Mengembangkan DRPPA/KRPPA sebagai upaya mempercepat implementasi perlindungan di tingkat desa/kelurahan.
- b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat :
- Edukasi dan Sosialisasi memberikan pendidikan dan informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak, serta bentuk-bentuk kekerasan dan cara melindunginya, melalui berbagai media.
  - Kampanye Publik Melakukan kampanye kesadaran untuk mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan dan diskriminasi.
  - Peran Aktif Masyarakat Mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk menjadi pelopor perlindungan perempuan dan anak.
- c. Perlindungan Khusus :
- Perlindungan Anak Memastikan pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi.
  - Perlindungan Perempuan Memberikan perlindungan khusus bagi perempuan yang rentan terhadap kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan bentuk eksploitasi lainnya.
  - Pencegahan Perkawinan Anak Melakukan upaya pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi dan edukasi.
- d. Penyediaan Layanan Terpadu:
- Layanan Kesehatan: Memberikan layanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
  - Layanan Hukum: Memastikan akses ke layanan hukum yang adil dan berpihak pada korban kekerasan.



- Layanan Perlindungan: Menyediakan tempat aman (shelter) dan layanan pendampingan bagi korban kekerasan.
- e. Pemanfaatan Teknologi :
- Digitalisasi Layanan: Mengembangkan platform digital untuk memudahkan akses informasi, pelaporan kasus, dan penyediaan layanan bagi perempuan dan anak.
  - Pengumpulan Data: Memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan data terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak guna analisis dan perumusan kebijakan yang lebih efektif.

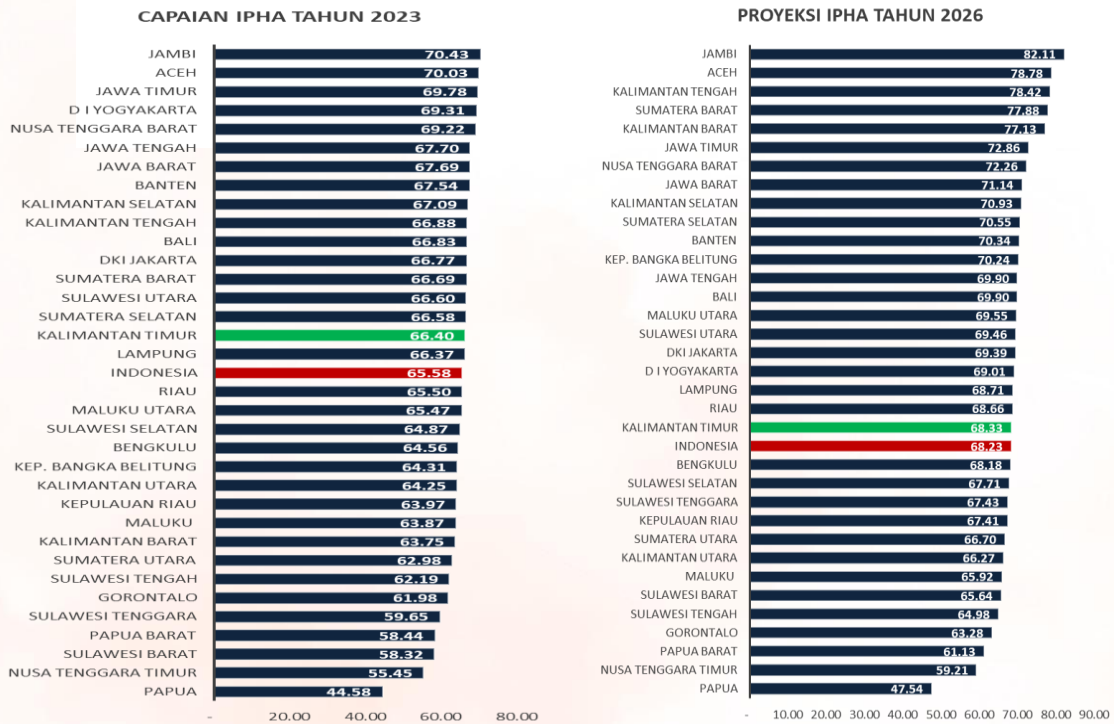
### 3. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berpartisipasi dalam memenuhi hak anak. Pemenuhan hak-hak anak merupakan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Peningkatan kualitas anak tentunya harus diawali dengan memberikan perlindungan atas hak anak karena setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup aman, nyaman, dan sejahtera. Sejak tahun 2020, kinerja pembangunan perlindungan anak di Indonesia dinilai berdasarkan Indeks Perlindungan Anak (IPA). IPA merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA terdiri atas Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Ukuran pemenuhan hak anak dapat dilihat melalui IPHA. Sementara itu, indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar dapat diidentifikasi melalui IPKA.

Gambar 2.8



## Capaian IPA dan IPHA Kalimantan Timur Tahun 2021-2023



Sumber Data : Kemen PPPA RI, 2024

Berdasarkan gambar diatas diperoleh data bahwa pada IPA di Kalimantan Timur pada tahun 2023 berada di posisi ke 16 dengan capaian Indeks sebesar 66.40 dan berada diatas rata - rata Nasional, sedangkan untuk Proyeksi IPHA pada tahun 2026 diperkirakan Capaian Indeks sebesar 68.33 dan tetap berada diatas rata - rata nasional yang ditargetkan sebesar 68.23.

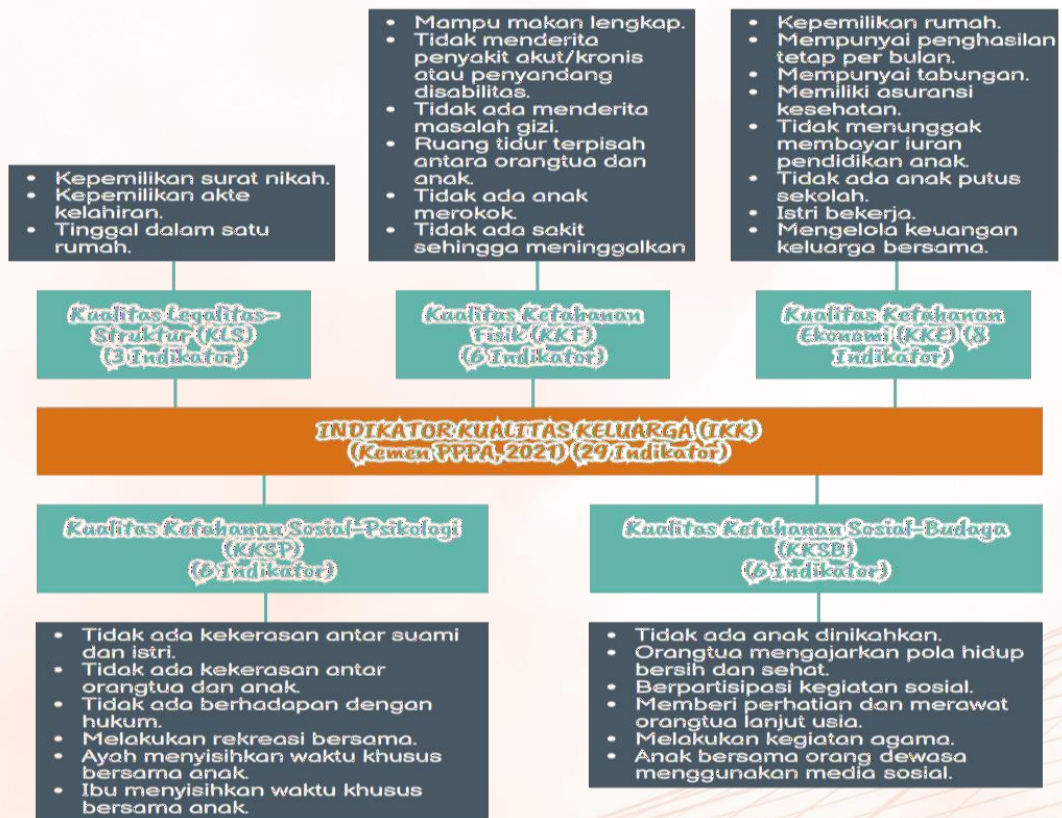
Keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial yang mempunyai peranan penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Permen PPPA Nomor 7 tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa kualitas keluarga yang baik menjadi landasan kualitas ketahanan sosial masyarakat yang sejahtera dan menjadi pilar penyangga pembangunan suatu bangsa, antara lain dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Tingkat kualitas keluarga Indonesia yang diukur dengan Indeks Kualitas Keluarga (IKK). Indeks ini dibentuk oleh lima dimensi yaitu dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik,



kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya. Publikasi ini diharapkan digunakan sebagai referensi dalam menentukan prioritas program/kebijakan bidang pembangunan keluarga.

Gambar 2.9  
Indikator dan Dimensi Penyusunan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)



Sumber Data : Kemen.PPPA

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) di Provinsi Kalimantan Timur baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru, sama- sama mengalami peningkatan yaitu pada metadata lama sebesar 1,96 poin atau naik dari 76,76 persen menjadi 78,72 persen ada tahun 2023. Sedangkan pada metadata baru, nilai IKK meningkat sebesar 2,06 poin atau naik dari 77,42 persen menjadi 79,48 persen pada tahun 2023. Nilai IKK Provinsi Kalimantan Timur baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan nilai IKK level nasional. Berdasarkan Permen PPPA Nomor 7 tahun 2022, nilai IKK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 menunjukkan kualitas keluarga



pada kategori „**Responsif Gender dan Hak Anak**’. Data tersebut dimuat dalam gambar berikut ini :

Gambar 2.10  
Capaian Indikator dan Dimensi Indeks Kualitas Keluarga (IKK)  
Kalimantan Timur, Tahun 2022-2023



*Sumber Data : Kemen PPPA RI, 2024*

Dimensi penyusun IKK terdiri dari lima (5) dimensi penyusun. Pada tahun 2023, dari lima dimensi penyusun IKK baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru semua dimensinya mengalami peningkatan. Dimensi yang mengalami peningkatan terbesar adalah dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP), menggunakan metadata lama meningkat sebesar 4,44 poin atau dari 68,72 persen menjadi 73,16 persen pada tahun 2023, sedangkan menggunakan metadata baru mengalami peningkatan sebesar 5,92 poin atau meningkat dari 70,08 persen menjadi 76,00 persen pada tahun 2023.

#### 4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah upaya untuk menyeimbangkan jumlah penduduk dengan sumber daya yang tersedia serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan keluarga. Ini melibatkan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan akses terhadap pelayanan keluarga berencana, dan



memperkuat ketahanan keluarga.

Fokus utama dalam pengendalian penduduk adalah pada perencanaan keluarga yang sehat dan sejahtera, bukan sekadar membatasi jumlah anak. Ini melibatkan upaya untuk memastikan setiap anak yang lahir dapat tumbuh dengan perhatian dan dukungan penuh, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui berbagai program dan kebijakan.

a. Demografi

- Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2020 sebesar 3.757.220 jiwa dan terus meningkat menjadi 4.045.860 jiwa pada tahun 2024 atau bertambah sebesar 288.640 jiwa.

Tabel 2.12  
Jumlah Pendudukan Provinsi Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Paser	274.890	278.040	281.140	284.110	286.990	1,10
2	Kubar	171.940	173.750	175.470	177.130	178.740	0,99
3	Kukar	727.610	735.970	746.370	756.790	789.779	2,14
4	Kutim	432.550	440.290	447.940	455.500	462.990	1,71
5	Berau	247.210	250.950	254.660	258.290	261.830	1,45
6	PPU	178.060	180.590	188.900	197.630	267.690	11,38
7	Mahulu	32.420	32.870	33.320	33.770	34.250	1,39
8	Balikpapan	687.060	694.940	702.600	710.040	717.230	1,10
9	Samarinda	827.070	835.150	843.010	850.630	858.080	0,96
10	Bontang	178.410	180.920	183.370	185.850		1,37
	Kalimantan Timur	3.757.220	3.803.470	3.856.780	3.909.740		1,93

Sumber data : BPS Kaltim tahun 2023

- Rasio dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan *Sex Ratio*, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.13



Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, *Sex Ratio*, dan  
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota  
Kalimantan Timur Tahun 2024

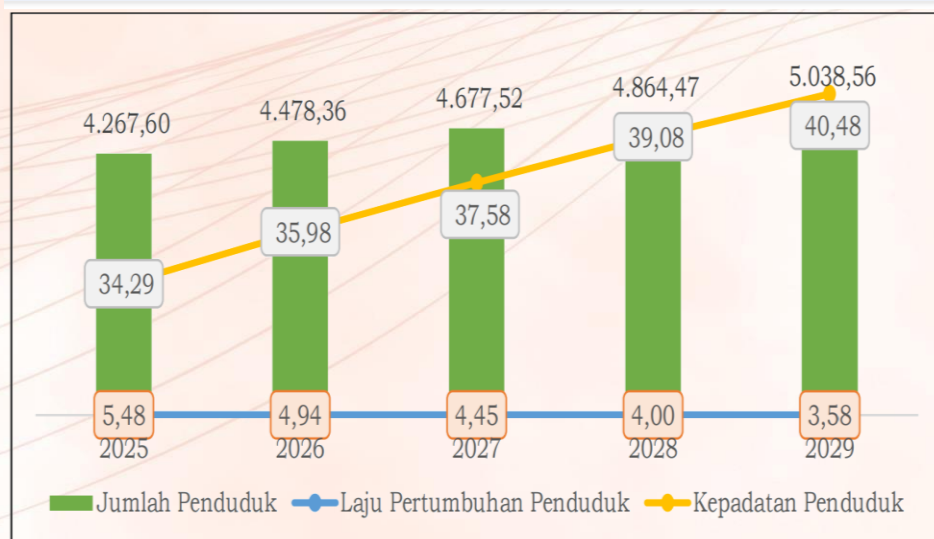
No	Kabupaten/Kota	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Per Km2)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	Paser	148.880	138.110	286.990	107,80	27,00
2	Kutai Barat	93.950	84.800	178.740	110,79	13,00
3	Kukar Kartanegara	409.890	379.880	789.770	107,90	29,00
4	Kutai Timur	248.020	214.980	462.990	115,37	15,00
5	Berau	139.350	122.480	261.830	113,77	12,00
6	Penajam paser Utara	137.570	130.120	267.690	105,72	84,00
7	Mahakam Ulu	17.760	16.490	34.250	107,66	2,00
8	Balikpapan	366.050	351.190	717.230	04,23	1.407,00
9	Samarinda	435.900	422.180	858.080	103,25	1.197,00
10	Bontang	96.560	91.730	188.290	105,26	1.171,00
Kalimantan Timur		2.093.900	1.951.960	4.045.860	107,27	32,00

Sumber data : BPS Kaltim tahun 2023

- Proyeksi Demografi Tahun 2025-2029

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi.

Gambar. 2.11  
Proyeksi Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk  
Kalimantan Timur Tahun 2025-2029



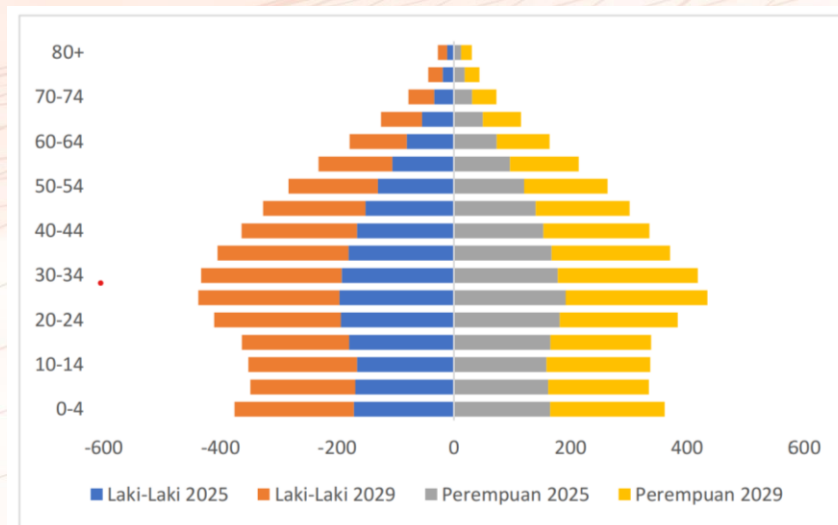
Sumber data : BPS Provinsi Kaltim tahun 2024



Perhitungan proyeksi penduduk dilakukan dengan mempertimbangkan aspek masa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim yang dengan pemindahan IKN diperkirakan akan mengubah besaran migrasi penduduk di Kaltim. Menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022, pada tahun 2025-2029 merupakan periode pemindahan penduduk tahap dua, sehingga jumlah penduduk diproyeksikan meningkat signifikan seiring pemindahan ASN selesai pada tahap ini sehingga kepadatan penduduk di Provinsi Kaltim juga semakin tinggi diproyeksikan mencapai 40,48 per km<sup>2</sup> di tahun 2029 dengan laju pertumbuhan penduduk 3,58 persen.

Dalam kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur akan mengalami bonus demografi yang terlihat dari angka ketergantungan yang diproyeksikan sebesar 40,17 persen pada tahun 2025 dan menurun menjadi 39,35 persen pada tahun 2029 dengan capaian di bawah 50 persen. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang yang tidak dan belum produktif. sehingga piramida penduduk Kalimantan Timur cenderung tidak berubah bentuk, dengan proporsi penduduk produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia anak (0-14 tahun) dan usia lansia (60 tahun ke atas), tergambar dibawah ini :

Gambar. 2.12  
Proyeksi Jumlah Penduduk, Menurut Kelompok Umur Kalimantan Timur Tahun 2025-2029



Sumber data : BPS Kaltim



Program Pembinaan Keluarga Berencana adalah upaya pemerintah untuk menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan sumber daya, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pengaturan kelahiran. Program ini bertujuan untuk membentuk keluarga kecil sejahtera, menekan angka kelahiran, dan mengurangi risiko kesehatan terkait kehamilan.. Fokus utama program pembinaan keluarga berencana adalah mewujudkan keluarga kecil berkualitas dengan cara menjarangkan kehamilan, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, dan meningkatkan kesehatan reproduksi serta kesejahteraan keluarga. Program ini juga bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga.

Tabel 2.14  
Target TFR dan mCPR Kalimantan Timur tahun 2020 - 2024

Angka kelahiran total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> ) per WUS usia 15-49 Tahun								Angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i> )							
NO	PROVINSI	TFR						NO	PROVINSI	mCPR					
		2017 <sup>1)</sup>	2020	2021	2022	2023	2024			2017 <sup>1)</sup>	2020	2021	2022	2023	2024
1	DKI JAKARTA	2,24	1,96	1,94	1,92	1,91	1,89	1	DKI JAKARTA	50,60	56,56	56,91	57,27	57,62	58,07
2	JAWA BARAT	2,36	2,15	2,12	2,10	2,07	2,04	2	JAWA BARAT	59,50	62,87	63,27	63,67	64,07	64,59
3	JAWA TENGAH	2,32	2,05	2,02	2,00	1,97	1,94	3	JAWA TENGAH	59,50	63,93	64,35	64,76	65,17	65,70
4	DI YOGYAKARTA	2,19	1,92	1,90	1,87	1,85	1,83	4	DI YOGYAKARTA	57,30	62,01	62,40	62,79	63,17	63,67
5	JAWA TIMUR	2,08	1,94	1,91	1,89	1,86	1,83	5	JAWA TIMUR	63,10	65,24	65,66	66,08	66,50	67,04
6	ACEH	2,72	2,19	2,17	2,15	2,13	2,11	6	ACEH	46,40	56,13	56,48	56,83	57,18	57,63
7	SUMATERA UTARA	2,93	2,20	2,18	2,16	2,14	2,11	7	SUMATERA UTARA	43,90	56,57	56,92	57,27	57,62	58,08
8	SUMATERA BARAT	2,48	2,24	2,22	2,20	2,18	2,16	8	SUMATERA BARAT	50,10	54,44	54,78	55,12	55,46	55,89
9	RIAU	2,87	2,25	2,23	2,20	2,18	2,15	9	RIAU	50,70	60,46	60,83	61,21	61,58	62,07
10	JAMBI	2,31	2,23	2,20	2,17	2,14	2,10	10	JAMBI	63,50	64,64	65,04	65,44	65,84	66,36
11	SUMATERA SELATAN	2,63	2,33	2,30	2,27	2,23	2,19	11	SUMATERA SELATAN	61,40	65,29	65,69	66,10	66,51	67,03
12	LAMPUNG	2,30	2,24	2,21	2,17	2,14	2,10	12	LAMPUNG	65,70	66,47	66,88	67,29	67,71	68,24
13	KALIMANTAN BARAT	2,65	2,24	2,21	2,18	2,14	2,10	13	KALIMANTAN BARAT	61,00	66,55	66,97	67,38	67,80	68,33
14	KALIMANTAN TENGAH	2,47	2,19	2,15	2,10	2,06	2,00	14	KALIMANTAN TENGAH	69,40	72,33	72,78	73,23	73,68	74,26
15	KALIMANTAN SELATAN	2,41	2,26	2,23	2,19	2,16	2,12	15	KALIMANTAN SELATAN	64,40	66,32	66,74	67,15	67,56	68,09
16	KALIMANTAN TIMUR	2,68	2,17	2,14	2,11	2,08	2,04	16	KALIMANTAN TIMUR	59,30	66,21	66,62	67,04	67,45	67,98
17	SULAWESI UTARA	2,24	2,10	2,07	2,05	2,02	1,99	17	SULAWESI UTARA	61,00	63,23	63,63	64,02	64,41	64,92
18	SULAWESI TENGAH	2,71	2,27	2,24	2,20	2,17	2,13	18	SULAWESI TENGAH	59,40	65,26	65,66	66,07	66,47	67,00
19	SULAWESI SELATAN	2,44	2,13	2,11	2,10	2,08	2,06	19	SULAWESI SELATAN	48,70	54,82	55,16	55,50	55,85	56,28
20	SULAWESI TENGGARA	2,83	2,30	2,28	2,26	2,24	2,21	20	SULAWESI TENGGARA	46,50	55,63	55,97	56,32	56,66	57,11
21	MALUKU	3,29	2,93	2,91	2,89	2,87	2,84	21	MALUKU	39,20	45,42	45,70	45,99	46,27	46,63
22	BALI	2,07	1,97	1,96	1,94	1,92	1,90	22	BALI	54,80	56,82	57,18	57,53	57,88	58,34
23	NUSA TENGGARA BARAT	2,54	2,25	2,23	2,21	2,19	2,16	23	NUSA TENGGARA BARAT	50,90	55,80	56,15	56,49	56,84	57,29
24	NUSA TENGGARA TIMUR	3,37	2,43	2,41	2,39	2,36	2,33	24	NUSA TENGGARA TIMUR	41,20	56,09	56,44	56,79	57,14	57,59
25	PAPUA	3,31	2,29	2,27	2,24	2,22	2,20	25	PAPUA	35,90	54,17	54,51	54,85	55,18	55,62
26	BENGKULU	2,30	2,24	2,21	2,17	2,14	2,10	26	BENGKULU	64,40	65,09	65,49	65,90	66,30	66,83
27	MALUKU UTARA	2,86	2,27	2,24	2,21	2,19	2,15	27	MALUKU UTARA	50,00	59,30	59,67	60,04	60,41	60,88
28	BANTEN	2,34	2,19	2,17	2,14	2,12	2,09	28	BANTEN	57,30	59,80	60,17	60,54	60,91	61,39
29	BANGKA BELITUNG	2,30	2,25	2,22	2,19	2,16	2,12	29	BANGKA BELITUNG	62,20	62,77	63,16	63,55	63,94	64,45
30	GORONTALO	2,46	2,21	2,18	2,15	2,12	2,08	30	GORONTALO	59,60	63,25	63,64	64,04	64,43	64,94
31	KEPULAUAN RIAU	2,29	2,19	2,17	2,16	2,14	2,13	31	KEPULAUAN RIAU	46,30	48,70	49,01	49,31	49,61	50,00
32	PAPUA BARAT	3,19	2,35	2,33	2,30	2,28	2,26	32	PAPUA BARAT	35,90	51,45	51,77	52,09	52,41	52,83
33	SULAWESI BARAT	2,74	2,33	2,31	2,28	2,26	2,23	33	SULAWESI BARAT	48,60	55,64	55,98	56,33	56,68	57,12
34	KALIMANTAN UTARA	2,80	2,23	2,20	2,17	2,15	2,12	34	KALIMANTAN UTARA	46,90	56,62	56,97	57,32	57,68	58,13
NASIONAL		2,40	2,26	2,24	2,21	2,19	2,1	NASIONAL		57,12	61,78	62,16	62,54	62,92	63,41

Keterangan: <sup>1)</sup> Baseline SDKI 2017

Keterangan: <sup>1)</sup> Baseline SDKI 2017

Sumber data : SDKI 2024



Pada tabel 2.6 ini terlihat pada indikator Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun terlihat bahwa Kalimantan Timur pada tahun 2017 berada pada kisaran angka 2.68 dan diproyeksikan pada tahun 2024 bisa mencapai angka 2.04 sedangkan untuk indikator Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) pada tahun 2017 berada pada kisaran angka 59.30 dan diproyeksikan pada tahun 2024 bisa mencapai angka 67.98.

**Tabel 2.15**  
**Target ASFR dan Unmetneed**  
**Kalimantan Timur tahun 2020 - 2024**

Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmetneed)							Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)					
NO	PROVINSI	UNMET NEED					ASFR 15-19 Tahun					
		2017	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	DKI JAKARTA	15,60	10,32	9,88	9,45	9,01	8,55	13	13	11	11	10
2	JAWA BARAT	11,00	8,17	7,69	7,22	6,75	6,22	30	29	25	24	22
3	JAWA TENGAH	10,80	6,82	6,34	5,86	5,38	4,84	26	25	22	21	19
4	DI YOGYAKARTA	6,30	5,74	5,62	5,50	5,38	5,29	17	16	14	13	12
5	JAWA TIMUR	7,70	7,54	7,36	7,18	7,00	6,84	31	30	26	25	22
6	ACEH	12,30	10,49	10,32	10,15	9,97	9,85	9	9	8	7	7
7	SUMATERA UTARA	10,70	8,64	8,50	8,36	8,21	8,11	22	21	18	17	16
8	SUMATERA BARAT	9,10	8,76	8,63	8,49	8,35	8,27	15	14	13	12	11
9	RIAU	11,30	9,15	8,97	8,79	8,61	8,47	33	31	27	26	23
10	JAMBI	6,80	6,95	6,79	6,63	6,47	6,33	24	23	20	19	17
11	SUMATERA SELATAN	8,60	7,88	7,70	7,51	7,32	7,16	27	26	22	21	19
12	LAMPUNG	8,40	8,69	8,47	8,26	8,04	7,85	36	34	30	29	26
13	KALIMANTAN BARAT	9,80	8,36	8,16	7,95	7,74	7,55	61	58	51	49	44
14	KALIMANTAN TENGAH	6,30	5,73	5,55	5,36	5,18	5,00	30	29	25	24	22
15	KALIMANTAN SELATAN	8,50	8,37	8,16	7,96	7,75	7,57	40	38	34	32	29
16	KALIMANTAN TIMUR	10,20	8,33	8,13	7,92	7,72	7,54	16	15	13	13	11
17	SULAWESI UTARA	12,40	10,88	10,40	9,92	9,44	8,92	43	41	36	34	31
18	SULAWESI TENGAH	9,40	8,04	7,85	7,66	7,47	7,31	38	36	32	30	27
19	SULAWESI SELATAN	14,40	8,86	8,45	8,03	7,62	7,17	40	38	34	32	29
20	SULAWESI TENGGARA	15,20	13,18	12,97	12,76	12,54	12,39	45	43	38	36	32
21	MALUKU	19,00	13,68	13,30	12,91	12,53	12,17	25	24	21	20	18
22	BALI	10,70	9,29	8,86	8,43	8,00	7,53	21	20	18	17	15
23	NUSA TENGGARA BARAT	15,60	14,72	14,48	14,24	14,00	13,84	38	36	32	30	27
24	NUSA TENGGARA TIMUR	17,60	13,89	13,67	13,44	13,21	13,05	20	19	17	16	14
25	PAPUA	15,20	12,03	11,85	11,67	11,48	11,36	53	51	45	43	38
26	BENGKULU	6,90	7,17	7,01	6,84	6,67	6,52	38	36	32	30	27
27	MALUKU UTARA	17,70	14,68	14,41	14,14	13,86	13,65	43	42	36	35	31
28	BANTEN	9,80	9,67	9,49	9,31	9,12	8,98	13	12	11	10	9
29	BANGKA BELITUNG	5,60	5,86	5,74	5,61	5,49	5,39	28	27	24	23	20
30	GORONTALO	12,90	9,90	9,43	8,95	8,47	7,96	43	42	36	35	31
31	KEPULAUAN RIAU	10,70	8,88	8,50	8,13	7,76	7,36	13	12	11	10	9
32	PAPUA BARAT	23,60	20,00	19,73	19,45	19,17	19,01	50	48	42	40	36
33	SULAWESI BARAT	14,60	13,17	12,96	12,75	12,53	12,39	44	42	37	35	32
34	KALIMANTAN UTARA	15,80	13,40	13,18	12,96	12,73	12,57	13	13	11	11	10
<b>NASIONAL</b>		<b>10,60</b>	<b>8,60</b>	<b>8,30</b>	<b>8,00</b>	<b>7,70</b>	<b>7,40</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>18</b>

Keterangan: \* Baseline SDKI 2017

Sumber data : SDKI 2024

Pada tabel 2.7 ini terlihat pada indikator Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmetneed) terlihat bahwa Kalimantan Timur pada tahun 2017 berada pada kisaran angka 10.20% dan



diproyeksikan pada tahun 2024 bisa mencapai angka 7.54% sedangkan untuk indikator Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) pada tahun 2017 berada pada kisaran angka 16 dan diproyeksikan pada tahun 2024 bisa mencapai angka 11 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indikator ini dikembangkan untuk menangkap dinamika pembangunan keluarga secara komprehensif dan terintegrasi dalam upaya peningkatan kualitas keluarga Indonesia. Dalam indikator ini, kualitas keluarga dicirikan dengan dimensi ketenteraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan Pembangunan Keluarga baik secara nasional maupun kewilayahan, mengidentifikasi isu strategis/permasalahan terkait kualitas keluarga, serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan yang dibutuhkan.

Tabel 2.16  
Target Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)  
Kalimantan Timur tahun 2020 - 2024

NO	PROVINSI	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	DKI JAKARTA	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46
2	JAWA BARAT	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55
3	JAWA TENGAH	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
4	DI YOGYAKARTA	61.43	63.07	65.36	67.66	69.95
5	JAWA TIMUR	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
6	ACEH	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
7	SUMATERA UTARA	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55
8	SUMATERA BARAT	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46
9	RIAU	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46
10	JAMBI	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55
11	SUMATERA SELATAN	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
12	LAMPUNG	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
13	KALIMANTAN BARAT	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55
14	KALIMANTAN TENGAH	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55
15	KALIMANTAN SELATAN	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55
16	KALIMANTAN TIMUR	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46
17	SULAWESI UTARA	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46
18	SULAWESI TENGAH	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
19	SULAWESI SELATAN	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55
20	SULAWESI TENGGARA	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
21	MALUKU	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
22	BALI	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46
23	NUSA TENGGARA BARAT	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
24	NUSA TENGGARA TIMUR	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
25	PAPUA	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
26	BENGKULU	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
27	MALUKU UTARA	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55
28	BANTEN	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46
29	BANGKA BELITUNG	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55
30	GORONTALO	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
31	KEPULAUAN RIAU	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46
32	PAPUA BARAT	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
33	SULAWESI BARAT	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
34	KALIMANTAN UTARA	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55
NASIONAL		53.57	55	57	59	61

Sumber data : SDKI 2024



Pada tabel 2.8 ini terlihat pada indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) pada tahun 2017 berada pada kisaran angka 55.73 dan diproyeksikan pada tahun 2024 bisa mencapai angka 63.46

## **5. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)**

UPTD PPA memiliki tugas utama memberikan layanan teknis operasional perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab melaksanakan kegiatan operasional di wilayah kerjanya, yang meliputi berbagai aspek perlindungan dan penanganan kasus. UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban

## **6. Pelayanan Kesekretariatan (capaian IKM, SAKIP)**

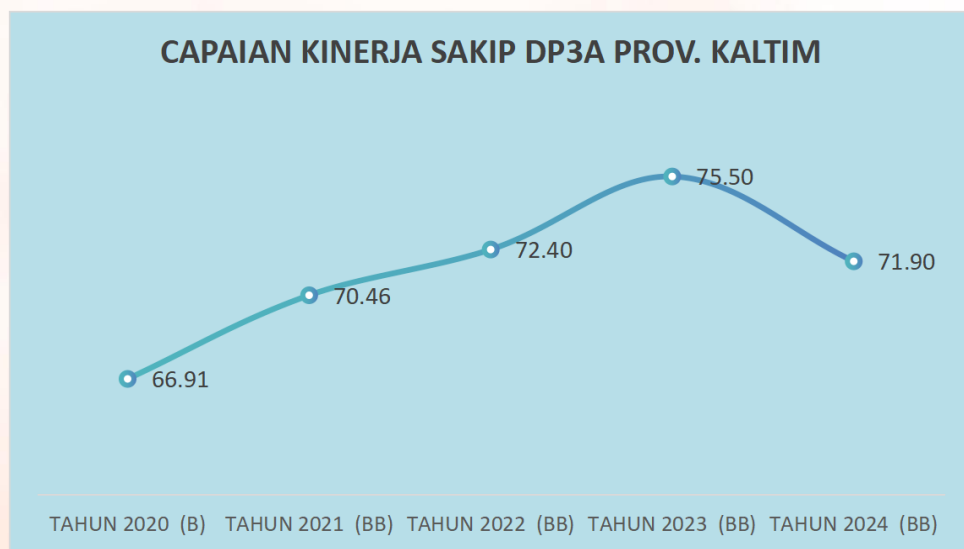
Pelayanan administrasi perkantoran merupakan program dan kegiatan yang diharapkan dapat memberikan pelayanan publik dengan baik. Adapun Program dan kegiatan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator Indeks Layanan Kesekretariatan yang diharapkan dapat mencapai 91,2 Indeks dan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti dapat mencapai angka 87% pada Tahun Anggaran 2026. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi ;
  - a. Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan.
  - b. Adminsitration Keuangan Perangkat Daerah



- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Adminsitrasi Barang Milik Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Gambar 2.13  
Capaian Nilai SAKIP DPPPA Provinsi Kaltim Tahun 2020-2024

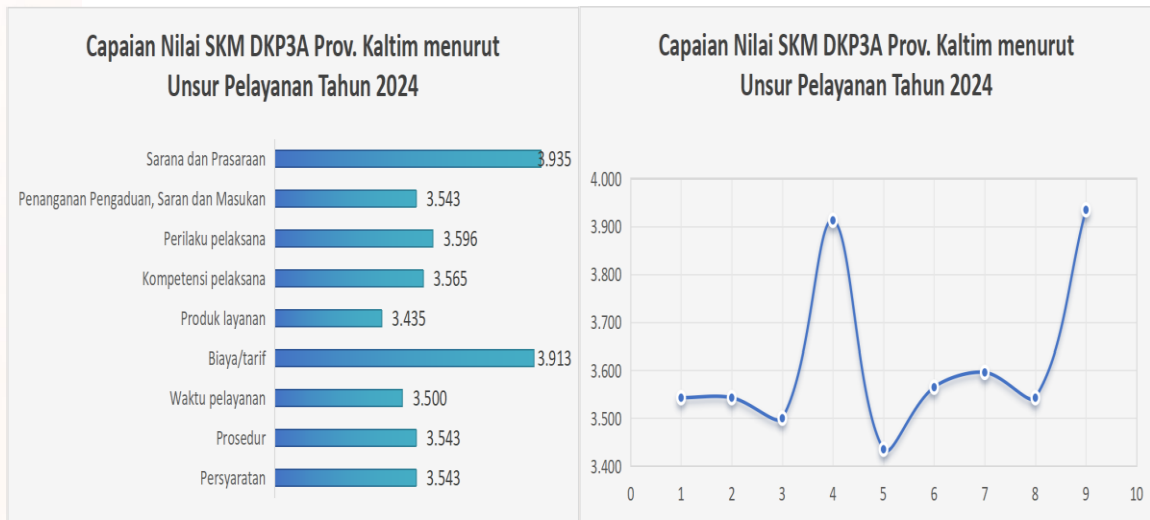


*Sumber Data : LHE Inspektorat Provinsi Kaltim 2020-2024*

Pada capaian Kinerja Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diperoleh gambaran bahwa DPPPA berada pada predikat “Sangat Baik” selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir walaupun secara total point mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan capaian point sebesar 71.90 turun dari capaian tahun 2023 sebanyak 75.50 point, namun tetap berada pada posisi (BB).



Gambar 2.14  
Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat DPPPA  
Provinsi Kaltim Tahun 2020-2024



Sumber data : DPPPA Kaltim tahun 2025

Gambar 2.14 memberikan data bahwa pada unsur produk layanan memperoleh nilai yang lebih rendah dari unsur lainnya yang dilakukan penilaian

#### D. Kelompok Sasaran Layanan

Mitra kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi Pemerintah Kabupaten/Kota Organisasi, Perangkat Daerah, Instansi/Lembaga Vertikal, Lembaga Penyedia Layanan, Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat, Praktisi, Pemerhati, dan Masyarakat pada umumnya sesuai dengan target kinerja dan kelompok sasaran kegiatan yang dituju.



## II.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### A. Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah

Beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17  
Identifikasi permasalahan

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Kualitas Hidup Perempuan	Belum tersedianya lembaga layanan pemberdayaan perempuan menuju standarisasi lembaga layanan
		Minimnya jumlah pelaku usahasekonomi perempuan yang terdaftar
		Minimnya jumlah sumber daya manusia (perempuan) yang unggul
		Belum optimalnya pengarusutamaan gender di Katim
2	Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan	Budaya Patriarki yang masih melekat di lingkungan masyarakat yang memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki, sehingga terjadi ketidaksetaraan dalam akses
		Rendahnya taraf Ekonomi dan Kemiskinan, seringkali sebagai pemicu terjadinya pola tindak kekerasan
		Dampak negatif dari kemajuan teknologi, internet dan media dapat memengaruhi perilaku dan niat pelaku kekerasan.
3	Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak	Kurangnya pemahaman pola pengasuhan ramah anak, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
		Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap isu perlindungan anak dan Pengaruh Pergaulan bebas dan Norma sosial yang permisif terhadap kekerasan dan diskriminasi.
		Meningkatnya Dispensasi Pernikahan Anak, Eksploitasi Anak dan Trafficking terhadap anak.
4	Belum Optimalnya	Belum tersedianya SDM yang memadai



No.	Masalah	Akar Masalah
	Kuantitas dan kualitas SDM pelayanan korban kekerasan	sesuai kualifikasi jabatan yang dibutuhkan Minimnya kompetensi SDM pelayanan yang terlatih Belum optimalnya pengalokasian anggaran pelayanan terhadap korban kekerasan
5	Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kalimantan Timur	Masih Rendahnya kuantitas dan kualitas Pemenuhan Hak Anak dan kualitas keluarga Belum optimalnya Penguatan Kelembagaan Pemenuhan hak anak Belum optimalnya sarana dan prasarana infrastrukturnal ramah anak di kab/kota Faktor kemiskinan membatasi akses terhadap pemenuhan gizi dan layanan kesehatan lainnya. Faktor stunting yang berdampak pada negatif pada perkembangan kognitif dan kesehatan sehingga menurunkan produktivitas dan kemampuan untk keluarga dari kemiskinan. Tingginya resiko eksploitasi dan kekerasan terhadap anakPergaulan bebas, Kurangnya pemahaman pola pengasuhan ramah anak, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
6	Belum optimalnya KIE pengendalian penduduk, keluarga berencana dan ketahanan keluarga	Belum optimalnya layanan administrasi, sosial, ekonomi,budaya dan kesejahteraannya Meningkatnya jumlah pernikahan usia muda dan kelahiran usia muda
7	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat (terutama pria) dalam program KB, minimnya dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, serta kurang optimalnya kerja sama antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah	kurangnya pemahaman dan informasi tentang manfaat program, hambatan budaya dan norma sosial yang keliru, serta ketersediaan infrastruktur dan sumber daya yang tidak memadai di daerah pedesaan hambatan budaya dan norma sosial yang keliru dilingkungan masyarakat ketersediaan infrastruktur dan sumber daya yang tidak memadai di daerah pedesaan



No.	Masalah	Akar Masalah
8	Belum optimalnya kinerja akuntabilitas perangkat daerah	Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM pelaksana fungsi managerial
		kurangnya komitmen terhadap akuntabilitas dan lemahnya implementasi SAKIP
		Keterbatasan SDM yang berkompeten

Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 sangat dipengaruhi oleh faktor Penghambat dan faktor pendukung. Berikut analisa faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.18

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

No	Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tujuan 2 : Terbangunnya Generasi Emas	Pengarurusutamaan Gender belum sepenuhnya diimplementasikan menjadi strategi pembangunan seluruh sektor	OPD belum menuangkan PPRG menjadi dasar dalam pencapaian kinerja Program dan Kegiatan	Ketersediaan SDM dan Sarana prasarana
				Adanya kebijakan PUG Kalimantan Timur menjadi pedoman seluruh penentu kebijakan
2.		Dokumen perencanaan penganggaran belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG	Lembaga PUG DPPPA belum berperan sesuai tugas fungsi	Eksistensi Tim Driver PUG telah memberikan daya dorong bagi optimalisasi implementasi PUG
3.		Ketimpangan Gender masih menjadi masalah dalam peningkatan kesetaraan gender di daerah	belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan	Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kelompok difabel
4.		Pengeluaran perkapita perempuan jauh di bawah laki-laki,	Tugas kewenangan DPPPA dalam meningkatkan keberhasilan	belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha,



No	Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		disebabkan sebagian besar perempuan hanya terserap di sektor informal, keterampilan terbatas, upah kerja minim, TPAK yang rendah, dan akses teknologi informasi yang terbatas	program pendapatan perempuan tidak secara langsung, namun di tentukan oleh komitmen lintas sektor lainnya ( Dinas tenaga kerja, disperidakop, Perbankan, dll).	media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam pemberdayaan perempuan
5.		Perempuan di legislatif belum mencapai kuota yang digariskan dalam regulasi	Pelaksanaan Program kegiatan Pendidikan Politik perempuan bersifat temporer	Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif
6.		Minimnya pelaku usaha ekonomi perempuan yang terdaftar	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan	Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait dan lembaga legislatif
7.		Penyediaan data pilah terkait capaian indikator kinerja Perangkat Daerah belum terintegrasi dengan tugas dan kewenangan bidang pada lingkup DPPPA	belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan	Pergub No. 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan data dan informasi Gender dan Anak
8.		Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Pergub No. 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan UPTD PPA pelaksana layanan korban kekerasan
9.		Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Implementasi Peraturan Perundangundangan belum optimal	Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan anak dan perempuan
10.		Meningkatnya angka pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Eksistensi peran PUSPAGA
11.		Database kependudukan yang belum akurat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan	Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 menjadi UU No. 24



No	Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			kepemilikan dokumen kependudukan sah (masih banyak dokumen kependudukan ganda)	Tahun 2013 akan segera berlaku efektif sehingga mendorong peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan
12		Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur 0,56% dari jumlah (Data Statistik Tahun 2018 )	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP) Kurang optimalnya koordinasi dengan institusi Program KB Belum tersedianya transfer data antara BKKBN dengan DPPPPA sehingga pengelolaan data menjadi terhambat Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program KB Perlu dilakukan penguatan komitmen pada pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), khususnya pada program kegiatan calon pengantin	Tersedianya tenaga medis/bidan di seluruh wilayah



## B. ISU STRATEGIS

Tabel 2.15  
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPPPA Provinsi Kaltim

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
<p>1. Proporsi penduduk usia produktif yang mendominasi struktur kependudukan Kalimantan Timur</p> <p>2. Dasar modal SDM yang cukup kuat, terutama modal pendidikan, tercermin dari capaian nilai IPM Kalimantan Timur menjadi yang tertinggi di Pulau Kalimantan</p> <p>3. Berkembangnya komunitas wirausaha muda di kota-kota besar, seperti Samarinda, Tenggarong, Balikpapan</p>	<p>Belum meratanya kualitas dan daya saing sumber daya manusia</p>	<p>Kesetaraan gender</p>	<p>Globalisasi tenaga kerja</p>	<p>Peningkatan kualitas SDM</p>	<p><i>Link &amp; match</i> pendidikan-DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)</p>	<p>Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Perempuan</p>

# BAB III



## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### III.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tujuan Renstra adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 2025-2029. Tujuan Renstra DPPPA Provinsi Kaltim tahun 2025-2029 mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 yang telah dikompositkan menjadi satu tujuan, yaitu **“Terwujudnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak Serta Keluarga Yang Berkualitas”** yang tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1  
Target Tujuan DPPPA Provinsi Kaltim Tahun 2025-2030

Tujuan	Indikator Tujuan	Baseline 2024	Target Tujuan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,46	87,47	87,48	87,50	87,51	87,60	87,65
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,441	0,396	0,387	0,378	0,368	0,359	0,351
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,04	66,09	68,15	70,20	71,49	72,86	74,22
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	74,32	77,46	78,33	78,89	79,45	79,96	80,52



Tabel 3.2  
Realisasi Kinerja Tujuan DPPPA Tahun 2020 -2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,95	86,18	86,77	87,13	87,46
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,467	0,436	0,443	0,414	0,441
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	73,60	64,06	64,41	64,04	64,04
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	N/A	54,9	56,7	64,5	65,5

### III.2 SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun Sasaran yang ditetapkan meliputi 6 (enam) sasaran kinerja yakni :

1. Meningkatnya partisipasi dan Kapasitas perempuan dalam bidang sosial budaya, politik, hukum dan ekonomi
2. Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
3. Meningkatnya Pemenuhan hak anak
4. Meningkatnya Keluarga Berkualitas
5. Terpenuhinya layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak
6. Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel



### **III.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

Pada Inpres 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamatakan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah dll untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Inpres ini menjadi bekal penting dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender yang bertujuan mencapai kesetaraan dan keadilan gender bagi masyarakat. Upaya kebijakan yang ditempuh tidak lain untuk mendorong pencapaian kesetaraan dan keadilan gender guna mewujudkan tujuan Renstra adalah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak
2. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
4. Menyediakan layanan rujukan akhir yang komprehensif dan berkualitas bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan perempuan korban kekerasan, yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas Provinsi/insinsi dan internasional;
5. Mengelola data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir dan terpadu;



6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan pada DPPPA Provinsi Kalimantan Tengah

Upaya dalam rangka mencapai sasaran Renstra DPPPA adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan di Berbagai Bidang Pembangunan, dengan strategi:
  - a. Penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
  - b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, dan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG), melalui advokasi, bimtek, serta penguatan monitoring dan evaluasinya;
  - c. Penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (e-learning), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya dalam upaya mengubah pola pikir mengenai gender dan norma sosial budaya yang menghambat PUG;
  - d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman perempuan dan keluarganya tentang kesetaraan gender melalui pelatihan bagi pendamping program pemberdayaan perempuan;
  - e. Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan dalam kepemimpinan dan politik, sosial serta ekonomi dan ketenagakerjaan;
  - f. Peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan, terutama di ekonomi untuk meningkatkan TPAK Perempuan;
  - g. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan program responsif gender dilaksanakan



h. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan pada Perangkat Daerah.

2. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya, dengan strategi:

- a. Penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya;
- b. Penguatan pelembagaan pemenuhan hak anak, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran, yang responsif terhadap pemenuhan hak anak, serta monitoring dan evaluasinya;
- c. Penguatan dan peningkatan kualitas pelayanan pemenuhan hak anak di semua klaster melalui fasilitasi identifikasi kebutuhan pelayanan, penyusunan Standar Operasional Prosedur, penyusunan Standar Pelayanan; penguatan sarana dan prasarana pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur dan petugas pelayanan, serta peningkatan intensitas monitoring dan evaluasi;
- d. Penyediaan materi pembelajaran tentang pemenuhan hak anak berbasis teknologi informatika (e-learning), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya;
- e. Peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan sebagai upaya pencegahan perkawinan anak;
- f. Peningkatan kapasitas Forum Anak di tingkat nasional dan daerah;



- g. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi (KLA), untuk memastikan pemenuhan hak anak dilaksanakan di daerah;
  - h. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah menurut kelompok usia untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan
3. Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kemen PPPA dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan strategi:
- a. Penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi tentang peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Perangkat Daerah dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. Meningkatkan pemahaman, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha di tingkat nasional dan daerah tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan peningkatan kualitas keluarga, melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (e-learning), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya;
  - c. Mendorong Lembaga masyarakat melakukan inovasi dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak bagi keluarga sebagai upaya meningkatkan kualitas keluarga;
  - e. Peningkatan sinergitas melalui forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) untuk percepatan terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kualitas keluarga;



- f. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data untuk percepatan terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kualitas keluarga; g. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan sinergitas dengan lembaga masyarakat di kementerian/lembaga, pemerintah Provinsi/instansi/kabupaten/kota
4. Peningkatan perlindungan hak perempuan, dengan strategi:
- a. Penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan perlindungan hak perempuan;
  - b. Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial;
  - c. Standarisasi (akreditasi) dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga penyedia layanan perempuan korban kekerasan;
  - d. Meningkatkan kompetensi SDM (APH, Peksos dll) dalam upaya memberikan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan;
  - e. Peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan mitra pembangunan;
  - f. Peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyediaan layanan rujukan akhir yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan
  - g. Menyusun dan mengembangkan sistem evaluasi hasil pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan untuk mengukur tingkat kepuasan penerima layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan



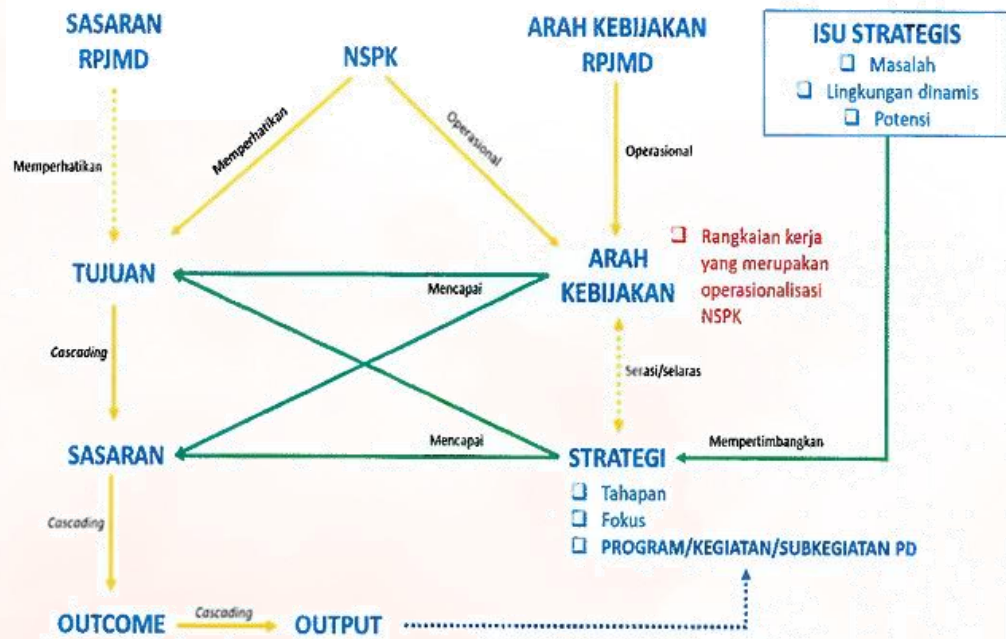
- h. Meningkatkan pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap bagi perempuan melalui penyediaan materi KIE; Mendorong seluruh daerah Provinsi/daerah dan kabupaten/kota untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPA, dan memperkuat lembaga UPTD PPA; dan
  - i. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan cakupan dan kualitas data kekerasan (termasuk TPPO) dan membangun sistem data kekerasan terpadu (dengan lembaga layanan, FPL, dst) (Pengembangan Simfoni PPA).
5. Peningkatan perlindungan khusus anak, dengan strategi :
- a. Penyusunan, revidi, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan perlindungan khusus anak;
  - b. Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial
  - c. Standarisasi (akreditasi) dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
  - d. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak;
  - e. Peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan mitra pembangunan;
  - f. Mendorong seluruh daerah Provinsi/daerah dan kabupaten/kota untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPA, dan memperkuat lembaga UPTD PPA;
  - g. Meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian



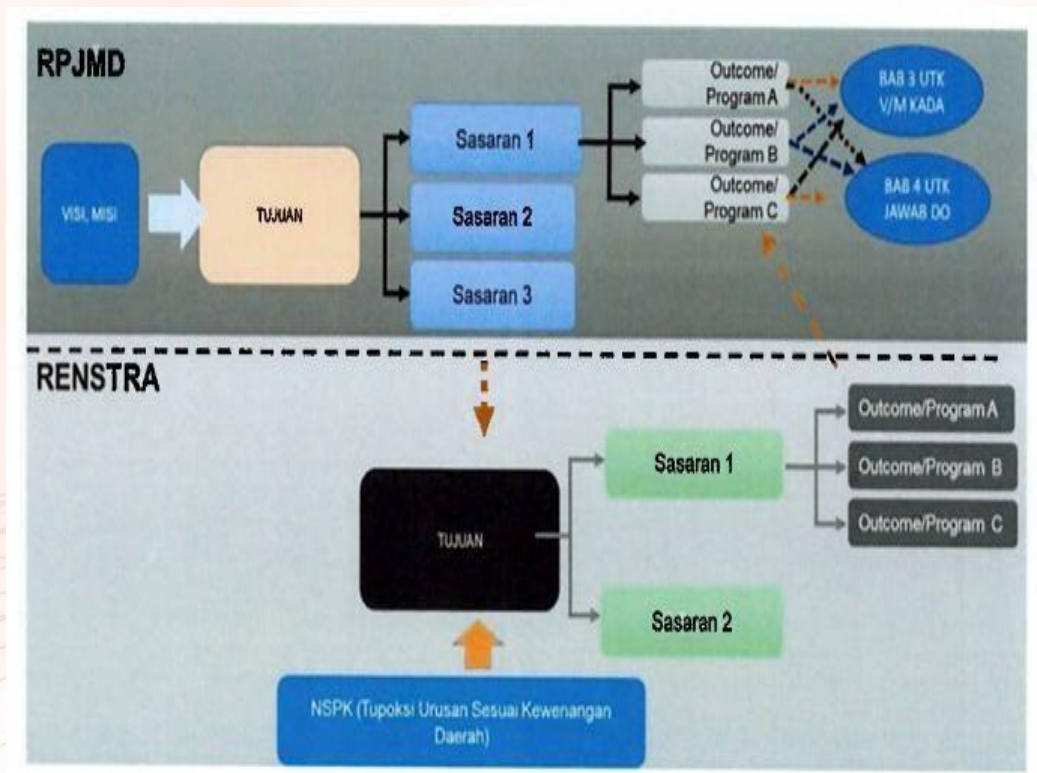
bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan fasilitasi rehabilitasi sosial anak;

- h. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data yang memerlukan perlindungan khusus melalui peningkatan cakupan dan kualitas serta membangun sistem data kekerasan lembaga masyarakat yang memberikan layanan sejenis. (Pengembangan Simfoni PPA).
6. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi:
- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran terus menerus dan berkesinambungan;
  - b. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berlaku;
  - c. Meningkatkan ketercukupan penyediaan sarana prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung tercapainya target kinerja;
  - d. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM secara proporsional sesuai dengan standar;
  - e. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan melalui pemenuhan kelengkapan mekanisme kerja meliputi pemetaan proses bisnis, penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar teknis yang lain sesuai kebutuhan; dan
  - f. Meningkatkan kualitas pengawasan internal untuk meningkatkan disiplin pegawai dan kinerja pegawai baik sebagai individu maupun dalam kelompok kerja.

Gambar 3.1  
Konsep Renstra Perangkat daerah



Gambar 3.2  
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah





Tabel 3.3  
Teknik Merumuskan Tujuan dan sasaran Renstra PD

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Sasaran						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Peraturan Menteri PPPA No. 3 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang PPPA (BAB II Urusan PPPA bagian kesatu kualitas hidup perempuan paragraph 1 penyelenggaraan kewenangan Pemerintah daerah Provinsi/insisi)	Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta keluarga yang berkualitas	Meningkatnya partisipasi dan Kapasitas perempuan dalam bidang sosial budaya, politik, hukum dan ekonomi	Proposi perempuan dalam kepemimpinan dan manajerial	45,11%	45,92%	46,94%	48,17%	49,63%	54,67%	
		Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Ratio Kekerasan Terhadap Perempuan per 100.000 perempuan	47,50	47,00	46,50	46,00	45,50	45,00	
			Ratio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 anak	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	
		Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan Kab/Kota Layak Anak	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
		Meningkatnya Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	67,2	68,9	70,6	72,3	74,00	74,8	
		Terpenuhinya layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	Persentase layanan perlindungan perempuan dan anak secara cepat akurat dan komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76,00	76,25	76,50	76,75	77,00	77,25	



Penahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPPPA Provinsi kaltim disajikan pada tabel berikut ini :

**Gambar 3.4**  
**Penahapan Pembangunan Renstra DPPPA Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029**

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan berkualitas	Penguatan Kebijakan dan Program dalam lingkup Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Ketahanan Keluarga lingkup provinsi dan kabupaten/kota	Peningkatan dan Penguatan peran lembaga penyedia layanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta lembaga ketahanan keluarga lingkup provinsi, kabupaten/kota se kalimantan timur	Optimalisasi peran masyarakat, stakeholder dan dunia usaha dalam mendukung Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta penguatan ketahanan keluarga	Sinergitas dan konsistensi lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga

#### **III.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Gubernur yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Arah kebijakan yang akan ditempuh DPPPA Provinsi Kaltim dalam rangka mencapai visi, tujuan dan sasaran Renstra DPPPA Provinsi Kaltim adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;



2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Pembangunan Ekonomi, dan Politik;
4. Peningkatan Pendapatan perempuan;
5. Peningkatan Koordinasi dan Mendorong Upaya-upaya Perlindungan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang;
7. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan.
9. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan
10. Administrasi serta Sarana dan Prasarana;
11. Peningkatan kualitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.5  
Teknik Merumuskan Arah kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
1	Meningkatnya produktivitas dan kapabilitas SDM	Meningkatkan partisipasi perempuan, pemuda, maupun penyandang disabilitas di berbagai bidang pembangunan, serta memberikan perlindungan kepada anak dan lansia	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	
			Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah	
			Peningkatan Pendapatan perempuan	
			Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak	



No	Operasionalisasi NSPK	Arah kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
			Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan	
			Peningkatan Koordinasi dan Mendorong Upaya- upaya Perlindungan dan pencegahan Terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	
			Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang	
			Peningkatan Layanan dan SDM	
			Sistem penanganan dan Kepastian Hukum	
			Pencegahan dan Edukasi	
			Penguatan kemitraan dan koordinasi	
			Meningkatnya kesertaan ber-KB	
			Meningkatnya pemahaman Masyarakat tentang kesehatan reproduksi	
			Meningkatnya pemanfaatan kelompok Tribina dan UPPKS dalam pembinaan kemandirian ber-KB.	
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Administrasi serta Sarana dan Prasarana	
			Peningkatan kualitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



Tabel 3.

Lokus Pelaksanaan Renstra DPPPA Provinsi Kaltim Tahun 2025-2030

Sasaran	Program dan Kegiatan	Lokus
Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel	[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
	[ KEGIATAN ] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	[ KEGIATAN ] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	[ KEGIATAN ] Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
	[ KEGIATAN ] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	[ KEGIATAN ] Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	[ KEGIATAN ] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	[ KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Meningkatnya partisipasi dan Kapasitas perempuan dalam bidang sosial budaya, politik, hukum dan ekonomi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Seluruh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/ Pemerintah/Non Pemerintah/Kabupaten dan Kota di wilayah di Kalimantan Timur yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
	[ PROGRAM ] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	[ KEGIATAN ] Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	
	[ KEGIATAN ] Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	
Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Seluruh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/ Pemerintah/Non Pemerintah/Kabupaten dan Kota di wilayah di Kalimantan Timur yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
	[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
	[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	



Sasaran	Program dan Kegiatan	Lokus
Meningkatnya Pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga	[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Seluruh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/ Pemerintah/Non Pemerintah/Kabupaten dan Kota di wilayah di Kalimantan Timur yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
	[ KEGIATAN ] Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
	[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
	[ KEGIATAN ] Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	
	[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
	[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
Meningkatnya Keluarga Berkualitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Seluruh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/ Pemerintah/Non Pemerintah/Kabupaten dan Kota di wilayah di Kalimantan Timur yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
	[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
	[ KEGIATAN ] Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
	[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
	[ KEGIATAN ] Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
	[ KEGIATAN ] Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi dalam pengelolaan pembinaan kesertaan ber-KB	
	[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
	[ KEGIATAN ] Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
	[ KEGIATAN ] Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	



Sasaran	Program dan Kegiatan	Lokus
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur (UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak)
	[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
	[ KEGIATAN ] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	[ KEGIATAN ] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	[ KEGIATAN ] Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	[ KEGIATAN ] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	[ KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	[ KEGIATAN ] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	[ KEGIATAN ]	
	[ KEGIATAN ] Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Seluruh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Pemerintah/Non Pemerintah/Kabupaten dan Kota di wilayah di Kalimantan Timur yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
	[ KEGIATAN ] Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	

## BAB IV



### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara nyata. Oleh sebab itu, DPPPA Provinsi Kaltim pada penyusunan program dan kegiatan perlu juga menetapkan indikator kinerja mengacu pada beberapa kriteria antara lain

1. terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
2. menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
3. memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah,
4. terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

#### IV. 1 URAIAN PROGRAM

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan dengan dukungan anggaran. Dalam Renstra DP3A Provinsi Kaltim Tahun 2025–2029, seluruhnya disusun mengacu pada RPJMD 2025-2029 guna mendukung visi dan misi daerah dalam kurun waktu lima tahun. Pelaksanaan program-program DPPPA Provinsi Kaltim sejumlah 10 (sepuluh) program meliputi :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Penelolaan Sistem Data Gender dan Anak



5. Program Pemenuhan Hak Anak
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pengendalian Penduduk
8. Program Keluarga Berencana
9. Program Kualitas Keluarga
10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan program-program UPTD PPA meliputi:

1. Program Perlindungan Perempuan
2. Program Perlindungan Khusus Anak
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

## **IV. 2 URAIAN KEGIATAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, DPPPA Provinsi Kaltim dalam melaksanakan fungsi Urusan PPPA dan Daduk KB, melaksanakan kegiatan serta pendanaan indikatif untuk pencapaian target yang telah ditetapkan. Beberapa bentuk kegiatan yang dilaksanakan DPPPA Provinsi Kaltim sejumlah 25 (dua puluh lima) meliputi :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi



10. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi
11. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
12. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
13. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
14. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
15. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
16. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
17. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
18. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
19. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
20. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
21. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
22. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal



23. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
24. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
25. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan UPTD PPA meliputi:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
8. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi



Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas PPPA Provisni Kaltim Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>							
Meningkatnya Prodiuktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta keluarga yang berkualitas				Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
					Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
					Indeks Perlindungan Anak (IPA)		
					Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
		Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
<b>NON URUSAN</b>							
			Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan yang tepat waktu	[ KEGIATAN ] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[ SUB KEGIATAN ] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akurat dan Tepat Waktu	Persentase realisasi anggaran	[ KEGIATAN ] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	[ KEGIATAN ] Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	[ SUB KEGIATAN ] Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	[ SUB KEGIATAN ] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	[ SUB KEGIATAN ] Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	[ KEGIATAN ] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	[ SUB KEGIATAN ] Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	[ SUB KEGIATAN ] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	[ KEGIATAN ] Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Kunjungan Tamu	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	[ SUB KEGIATAN ] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	[ SUB KEGIATAN ] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersediannya Barang yang tepat guna berkualitas dan efisiensi	Jumlah barang yang disediakan dan berfungsi dengan baik	[ KEGIATAN ] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Meubel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	[ KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berfungsi dengan Baik		Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	[ KEGIATAN ] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
		Meningkatnya partisipasi dan Kapasitas perempuan dalam bidang okum budaya, politik, okum dan ekonomi			Proporsi perempuan dalam kepemimpinan dan manajerial		
			Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan		Proporsi perempuan dalam kepemimpinan dan manajerial	[ PROGRAM ] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		
				Terpenuhinya jumlah lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang mendapatkan penguatan	Jumlah lembaga pemerintah dan non pemerintah yang mendapatkan penguatan	[ KEGIATAN ] Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
					jumlah OPD (Provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	[ SUB KEGIATAN ] Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	[ SUB KEGIATAN ] Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	
				Terpenuhinya Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan kapasitas menuju LPLPP	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan kapasitas menuju LPLPP	[ KEGIATAN ] Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
					Jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	[ SUB KEGIATAN ] pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
					Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	[ SUB KEGIATAN ] sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
					Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	[ SUB KEGIATAN ] peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
				Terpenuhinya Jumlah SDM lembaga yang mendapatkan pendampingan PUG	Jumlah SDM lembaga yang mendapatkan pendampingan PUG	[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	[ SUB KEGIATAN ] monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
		Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak			Ratio Kekerasan Terhadap Perempuan per 100.000 perempuan		
					Ratio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 anak		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Ratio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Terpenuhinya Jumlah Lembaga yang dilakukan pembinaan	Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	[ SUB KEGIATAN ] Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	
					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	
				Terpenuhinya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga penyedia layanan	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
					Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan	[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Tersedianya data dan informasi Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	Jumlah Penyajian Profil Gender dan anak serta laporan simfoni dalam satu tahun	[ KEGIATAN ] Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
					Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	[ SUB KEGIATAN ] Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	
					Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	
		Meningkatnya Pemenuhan hak anak			Pesentase kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan kab/kota layak anak		
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berprespektif gender dan hak anak sesuai standar	[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Terpenuhinya keluarga yang berkualitas dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	Persentase layanan terhadap Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	(KEGIATAN) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	[ SUB KEGIATAN ] Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	[ SUB KEGIATAN ] Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan Sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Terpenuhinya pelebagaan pengarusutamaan hak anak (PHA)	Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelebagaan PHA	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
					Jumlah OPD (Provinsi) dan Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	[ SUB KEGIATAN ] Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
					jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	[ SUB KEGIATAN ] Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	[ SUB KEGIATAN ] Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
				Terpenuhinya lembaga layanan anak yang berkualitas dan berkelanjutan	jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	
					Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
					jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	
			Terpenuhinya lembaga penyedia layanan keluarga yang andal dan terstandar	Jumlah Lembaga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan dalam peningkatan kualitas keluarga	Jumlah Laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Kerjasama antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	[ SUB KEGIATAN ] Monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi pengembangan Kewenangan Provinsi	[ SUB KEGIATAN ] Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatana kapasitas	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	[ SUB KEGIATAN ] pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	
					Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan terstandar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota		Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan Sosialisasi pencegahan KtA Kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	[ SUB KEGIATAN ] Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	[ SUB KEGIATAN ] Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	
			Terwujudnya dokumen layanan perlindungan anak yang terstandarisasi	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak	[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota		
					Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	[ SUB KEGIATAN ] penguatan Kerjasama Anatar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus	[ SUB KEGIATAN ] Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	
					Jumlah SDM Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Provinsi yang mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	[ SUB KEGIATAN ] Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>							
		Meningkatnya Keluarga Berkualitas			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk		Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate</i> /TFR)	[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate</i> /ASFR 15-19)		
				Terlaksananya perencanaan pembangunan yang terpadu dan berbasis data dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	[ KEGIATAN ] Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Fasilitas kegiatan kelompok kerja Bangga Kencana Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh provinsi	[ SUB KEGIATAN ] Penguatan Pengelolaan Kelompok Kerja Bangga Kencana Efektif	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	[ SUB KEGIATAN ] Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan Sosialisasi GDPK	
					Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	
					Jumlah Provinsi menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	[ SUB KEGIATAN ] Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tingkat Provinsi	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
					Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan KB		Angka prevalensi kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR)	[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi		
				Terpenuhinya sosialisasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Sosialisasi tingkat Provinsi/Kab/Kota	[ KEGIATAN ] Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	
					Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	
				Terpenuhinya organisasi kemasyarakatan yang mandiri dalam pengelolaan pembinaan kesertaan ber-KB	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi dalam pengelolaan pembinaan kesertaan ber-KB	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera		Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Terpenuhinya organisasi perempuan yang mandiri dan berdaya sebagai motor penggerak ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	[ KEGIATAN ] Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	
				Terpenuhinya organisasi kemasyarakatan yang mandiri dan berkelanjutan sebagai penggerak utama pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga	[ KEGIATAN ] Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi ke Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Fasilitasi pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	
					Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra	[ SUB KEGIATAN ] Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra	
					Jumlah Laporan Hasil Advokasi dan Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	
<b>UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>							
			Meningkatnya kinerja layanan sekretariat		Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	[ KEGIATAN ] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Sub Kegiatan) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	[ KEGIATAN ] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	(Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	(Sub Kegiatan) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	(Sub Kegiatan) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Umum yang Terpenuhi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	[ KEGIATAN ] Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	( Sub Kegiatan ) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	( Sub Kegiatan ) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	( Sub Kegiatan ) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	( Sub Kegiatan ) Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	( Sub Kegiatan ) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	( Sub Kegiatan) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang yang disediakan dan berfungsi dengan baik	[ KEGIATAN ] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	( Sub Kegiatan) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	( Sub Kegiatan) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berfungsi dengan Baik	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	[ KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	( Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	( Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berfungsi dengan Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	[ KEGIATAN ] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	( Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	( Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	( Sub Kegiatan) - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Persentase Perempuan Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Terlaksananya layanan perlindungan khusus anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan UPTD PPPA	[ KEGIATAN ] Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	( Sub Kegiatan ) layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	( Sub Kegiatan ) layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	( Sub Kegiatan ) Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	( Sub Kegiatan ) layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	( Sub Kegiatan ) layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	( Sub Kegiatan) Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	( Sub Kegiatan) layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	( Sub Kegiatan) layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Terlaksananya layanan perlindungan khusus anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan khusus	[ KEGIATAN ] Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	( Sub Kegiatan) Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	( Sub Kegiatan) layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	( Sub Kegiatan) Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	( Sub Kegiatan) layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	( Sub Kegiatan) layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	( Sub Kegiatan) layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	( Sub Kegiatan) layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	( Sub Kegiatan) layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	



### IV. 3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Rangkaian kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 (lima) tahun anggaran (tahun 2025-2029) dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana Tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2  
Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Target dan Pagu Indikator Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
		2026		2027		2028		2029		2030				
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>														
<b>NON URUSAN</b>														
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91,2 Indeks	17.777.376.394	91,4 Indeks	9.938.262.926	91,6 Indeks	10.208.570.707	91,8 Indeks	10.287.912.094	92 Indeks	10.241.895.116	DP3A		
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	87%		88%		89%		90%		91%		DP3A		
[ KEGIATAN ] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,25	430.000.000	76,50	191.000.000	76,75	191.000.000	77,00	208.000.000	77,25	191.000.000	DP3A		
[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	60.000.000	5 Dok	53.000.000	5 Dok	53.000.000	5 Dok	70.000.000	5 Dok	53.000.000	DP3A		
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2 Dok	7.500.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	DP3A		
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD			1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	DP3A		
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2 Dok	7.500.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	DP3A		
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD			1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	DP3A		



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Target dan Pagu Indikator Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		2026		2027		2028		2029		2030			
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	136.000.000	27 Lap	50.000.000	27 Lap	50.000.000	27 Lap	50.000.000	27 Lap	50.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	219.000.000	5 Lap	50.000.000	5 Lap	50.000.000	5 Lap	50.000.000	5 Lap	50.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			6 Data	12.000.000	6 Data	12.000.000	6 Data	12.000.000	6 Data	12.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah			1 Berita Acara	6.000.000	1 Berita Acara	6.000.000	1 Berita Acara	6.000.000	1 Berita Acara	6.000.000	DP3A	
[ KEGIATAN ] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95.00%	14.568.985.412	95.00%	8.614.069.407	95.00%	8.503.366.544	95.00%	8.476.364.277	95.00%	8.513.127.515	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Org/Bln	14.342.145.412	64 Org/Bln	8.424.069.407	64 Org/Bln	8.313.366.544	64 Org/Bln	8.286.364.277	64 Org/Bln	8.323.127.515	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	126.840.000	4 Dok	75.000.000	4 Dok	75.000.000	4 Dok	75.000.000	4 Dok	75.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	20.000.000	1 Lap	25.000.000	1 Lap	25.000.000	1 Lap	25.000.000	1 Lap	25.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Blnan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Blnan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Blnan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Lap	30.000.000	18 Lap	40.000.000	18 Lap	40.000.000	18 Lap	40.000.000	18 Lap	40.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	DP3A	
[ KEGIATAN ] Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	95.00%	16.250.527	95.00%	100.000.000	95.00%	100.000.000	95.00%	100.000.000	95.00%	100.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dok	25.000.000	2 Dok	25.000.000	2 Dok	25.000.000	2 Dok	25.000.000	DP3A	



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Target dan Pagu Indikator Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		2026		2027		2028		2029		2030			
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
[ SUB KEGIATAN ] Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dok	25.000.000	2 Dok	25.000.000	2 Dok	25.000.000	2 Dok	25.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Rekonsiliasi dan Penyusunan Lap Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Lap Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	16.250.527	6 Lap	25.000.000	6 Lap	25.000.000	6 Lap	25.000.000	6 Lap	25.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4 Lap	25.000.000	4 Lap	25.000.000	4 Lap	25.000.000	4 Lap	25.000.000	DP3A	
[ KEGIATAN ] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	86 Org	48.000.000	70 Org	88.085.251	70 Org	102.282.165	70 Org	107.396.273	70 Org	112.766.087	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dok	48.000.000	3 Dok	77.085.251	3 Dok	91.282.165	3 Dok	93.396.273	3 Dok	98.766.087	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	3.000.000	1 Dok	3.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			5 Org	5.000.000	5 Org	5.000.000	5 Org	5.000.000	5 Org	5.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			2 Org	2.000.000	2 Org	2.000.000	3 Org	3.000.000	3 Org	3.000.000	DP3A	
[ KEGIATAN ] Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	117 Unit	579.803.825	117 Unit	264.255.756	117 Unit	306.846.492	117 Unit	322.188.816	117 Unit	338.298.258	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.000.000	3 Paket	44.042.626	3 Paket	51.141.082	3 Paket	53.698.136	3 Paket	56.383.043	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	60.026.600	10 Paket	44.042.626	10 Paket	51.141.082	10 Paket	53.698.136	10 Paket	56.383.043	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	25.000.000	2 Paket	40.042.626	2 Paket	51.141.082	2 Paket	53.698.136	2 Paket	56.383.043	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dok	1.000.000	1 Dok	1.000.000	1 Dok	1.000.000	1 Dok	1.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Lap	40.000.000	1 Lap	44.042.626	1 Lap	51.141.082	1 Lap	53.698.136	1 Lap	56.383.043	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Lap	409.777.225	3 Lap	44.042.626	3 Lap	51.141.082	3 Lap	53.698.136	3 Lap	56.383.043	DP3A	



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Target dan Pagu Indikator Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		2026		2027		2028		2029		2030			
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
[ SUB KEGIATAN ] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dok	35.000.000	3 Dok	47.042.626	3 Dok	50.141.082	3 Dok	52.698.136	3 Dok	55.383.043	DP3A	
[ KEGIATAN ] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusn pemerintah daerah			7 Unit	20.000.000	7 Unit	20.000.000	7 Unit	30.000.000	7 Unit	30.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	7.000.000	1 Unit	7.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	7.000.000	1 Unit	7.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	2.000.000	1 Unit	2.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	2.000.000	1 Unit	2.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	DP3A	
[ KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenis jasa	1.676.116.017	4 jenis jasa	320.426.256	4 jenis jasa	491.410.824	4 jenis jasa	506.981.364	4 jenis jasa	533.830.432	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	10.000.000	1 Lap	10.106.564	1 Lap	127.852.706	1 Lap	134.245.341	1 Lap	140.957.608	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Lap	397.420.000	1 Lap	110.106.564	1 Lap	127.852.706	1 Lap	134.245.341	1 Lap	140.957.608	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Lap	10.000.000	1 Lap	90.106.564	1 Lap	107.852.706	1 Lap	104.245.341	1 Lap	110.957.608	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Lap	1.258.696.017	3 Lap	110.106.564	3 Lap	127.852.706	3 Lap	134.245.341	3 Lap	140.957.608	DP3A	
[ KEGIATAN ] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	115 Unit	458.220.613	90 Unit	440.426.256	90 Unit	493.664.682	90 Unit	536.981.364	88 Unit	422.872.824	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	55.000.000	1 Unit	110.106.564	1 Unit	110.106.564	1 Unit	134.245.341	1 Unit	120.957.608	DP3A	



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Target dan Pagu Indikator Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		2026		2027		2028		2029		2030			
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	191.220.613	26 Unit	110.106.564	26 Unit	127.852.706	26 Unit	134.245.341	26 Unit	120.957.608	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	67.000.000	60 Unit	100.106.564	60 Unit	127.852.706	60 Unit	134.245.341	60 Unit	120.957.608	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	20.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	20.000.000	DP3A	
[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	145.000.000	1 Unit	100.106.564	1 Unit	107.852.706	1 Unit	114.245.341	1 Unit	20.000.000	DP3A	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>													
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Proporsi Perempuan dalam Kepemimpinan dan Manajemen</b>	<b>45,92%</b>	<b>1.072.180.012</b>	<b>46,94%</b>	<b>792.692.513</b>	<b>48,17%</b>	<b>899.827.138</b>	<b>49,63%</b>	<b>899.827.138</b>	<b>54,67%</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>DP3A</b>	
	<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan</b>	<b>50,20 - 51,26%</b>		<b>50,75 - 51,69%</b>		<b>51,30 - 52,11%</b>		<b>51,86 - 52,54%</b>		<b>52,41 - 52,97%</b>			
[ Kegiatan ] PeLembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang mendapatkan penguatan	10 Lembaga	286.478.704	10 Lembaga	219.154.013	10 Lembaga	220.000.000	10 Lembaga	220.000.000	10 Lembaga	421.461.500	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	1 Kebijakan	43.367.918					1 Kebijakan	100.000.000	1 Kebijakan	100.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi			1 Lap	50.000.000							DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	37 Lembaga	193.842.646	37 Lembaga	59.154.013	37 Lembaga	100.000.000			37 Lembaga	171.461.500	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	49.268.140	1 Lembaga	110.000.000	1 Lembaga	120.000.000	1 Lembaga	120.000.000	1 Lembaga	150.000.000	DP3A	



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Target dan Pagu Indikator Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		2026		2027		2028		2029		2030			
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
[ Kegiatan ] Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan kapasitas menuju LPLPP	1 Lembaga	405.709.606	1 Lembaga	300.000.000	1 Lembaga	391.242.138	1 Lembaga	391.242.138	1 Lembaga	280.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] pendampingan Lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	5 Lembaga	160.661.480	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	191.242.138	1 Lembaga	191.242.138	1 Lembaga	80.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	260 Org	93.265.510	270 Org	100.000.000	270 Org	100.000.000	270 Org	100.000.000	270 Org	100.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100 Org	151.782.616	75 Org	100.000.000	75 Org	100.000.000	75 Org	100.000.000	75 Org	100.000.000	DP3A	
[ Kegiatan ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapatkan pendampingan PUG	100 org	379.991.702	100 Org	273.538.500	100 Org	288.585.000	100 Org	288.585.000	100 Org	298.538.500	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] monitoring evaluasi dan PeLap penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	1 Lap	43.761.200	1 Lap	113.538.500	1 Lap	128.585.000	1 Lap	128.585.000	1 Lap	138.538.500	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Peningkatan Kapasitas Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	200 Org	101.478.850			200 Org	160.000.000			200 Org	160.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	234.751.652	1 Lembaga	160.000.000		-	1 Lembaga	160.000.000			DP3A	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Ratio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>	<b>47,00 Ratio</b>	<b>818.400.000</b>	<b>46,50 Ratio</b>	<b>250.000.000</b>	<b>46,00 Ratio</b>	<b>300.000.000</b>	<b>45,50 Ratio</b>	<b>300.000.000</b>	<b>45,00%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>DP3A</b>	
[ Kegiatan ] Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	10 Lembaga	818.400.000	10 Lembaga	150.000.000	10 Lembaga	170.000.000	10 Lembaga	180.000.000	2 Dok	170.000.000	DP3A	



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Target dan Pagu Indikator Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		2026		2027		2028		2029		2030			
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
[ SUB Kegiatan ] Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1 Dok	300.000.000	2 Dok	40.000.000	2 Dok	40.000.000	2 Dok	40.000.000	2 Dok	40.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	300 Org	518.400.000	300 Org	70.000.000	300 Org	70.000.000	300 Org	80.000.000	300 Org	70.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil Kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota			1 Kegiatan	40.000.000	1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	60.000.000	DP3A	
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan penguatan			1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	130.000.000	1 Lembaga	120.000.000	1 Lembaga	130.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek			50 Org	100.000.000	60 Org	130.000.000	50 Org	120.000.000	60 Org	130.000.000	DP3A	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar</b>	<b>12 Lembaga</b>	<b>72.646.788</b>	<b>14 Lembaga</b>	<b>200.000.000</b>	<b>16 Lembaga</b>	<b>200.000.000</b>	<b>18 Lembaga</b>	<b>200.000.000</b>	<b>20 Lembaga</b>	<b>200.000.000</b>	<b>DP3A</b>	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase layanan terhadap Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	100%	72.646.788	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000		100.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] monitoring evaluasi dan Pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil monitoring evaluasi dan PeLap dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			1 Dok	60.000.000	1 Dok	60.000.000	1 Dok	60.000.000	1 Dok	60.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] penguatan kerjasama antar Lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil Kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil Kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Lembaga	72.646.788	1 Lembaga	10.000.000	1 Lembaga	10.000.000	1 Lembaga	10.000.000	1 Lembaga	10.000.000	DP3A	



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Target dan Pagu Indikator Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		2026		2027		2028		2029		2030			
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase layanan terhadap Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak			100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi			3 Lembaga	50.000.000	5 Lembaga	50.000.000	7 Lembaga	50.000.000	7 Lembaga	50.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas			1 Lembaga	50.000.000	1 Lembaga	50.000.000	1 Lembaga	50.000.000	1 Lembaga	50.000.000	DP3A	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan</b>	<b>100%</b>	<b>149.326.789</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>DP3A</b>	
[ Kegiatan ] Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam KeLembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah data gender dan anak di Provinsi yang tersedia	20 Data	149.326.789	20 Data	100.000.000	20 Data	100.000.000	20 Data	100.000.000	20 Data	200.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan Pelap melalui Simfoni PPA	Jumlah Dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelap melalui Simfoni PPA	1 Dok	79.326.789	1 Dok	40.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	80.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Advokasi dan penguatan jejaring lintas Sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	20 Lembaga	70.000.000	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000	18 Lembaga	60.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia			1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	2 Dok	60.000.000	DP3A	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)</b>	<b>61,5 Indeks</b>	<b>757.869.026</b>	<b>62 Indeks</b>	<b>100.000.000</b>	<b>62,5 Indeks</b>	<b>125.000.000</b>	<b>63 Indeks</b>	<b>125.000.000</b>	<b>63,5 Indeks</b>	<b>125.000.000</b>	<b>DP3A</b>	
PeLembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan peLembagaan PHA	10 Lembaga	407.772.711	10 Lembaga	60.000.000	10 Lembaga	85.000.000	10 Lembaga	85.000.000	10 Lembaga	85.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	1 Kebijakan	60.945.320									DP3A	



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Target dan Pagu Indikator Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		2026		2027		2028		2029		2030			
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
[ SUB Kegiatan ] Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi			1 Lembaga	10.000.000	1 Lembaga	25.000.000	1 Lembaga	25.000.000	1 Lembaga	25.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	30 Org	149.255.429	20 Org	30.000.000	20 Org	40.000.000	20 Org	40.000.000	20 Org	40.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi			1 Lembaga	10.000.000	1 Lembaga	10.000.000	1 Lembaga	10.000.000	1 Lembaga	10.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Monitoring, Evaluasi, dan PeLap Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Lap	197.571.962	1 Lap	10.000.000	1 Lap	10.000.000	1 Lap	10.000.000	1 Lap	10.000.000	DP3A	
[ Kegiatan ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 Lembaga	350.096.315	10 Lembaga	40.000.000	10 Lembaga	40.000.000	10 Lembaga	40.000.000	10 Lembaga	40.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	2 Kegiatan	144.037.102	1 Keg	20.000.000	1 Keg	20.000.000	1 Keg	20.000.000	1 Keg	20.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 Dok	206.059.213	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	DP3A	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)</b>	<b>84 Indeks</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>88 Indeks</b>	<b>75.000.000</b>	<b>92 Indeks</b>	<b>75.000.000</b>	<b>96 Indeks</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100 Indeks</b>	<b>100.000.000</b>	<b>DP3A</b>	
[ Kegiatan ] Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	1 Lembaga	600.000.000	1 Lembaga	50.000.000	1 Lembaga	50.000.000	1 Lembaga	50.000.000		70.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	300 Org	400.000.000	300 Org	10.000.000	300 Org	10.000.000	300 Org	10.000.000	300 Org	25.000.000	DP3A	



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Target dan Pagu Indikator Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		2026		2027		2028		2029		2030			
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
[ SUB Kegiatan ] Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil Kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	100 Lembaga	200.000.000	1 Lembaga	10.000.000	1 Lembaga	10.000.000	1 Lembaga	10.000.000	1 Lembaga	15.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Penyusunan Kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi			1 Kebijakan	10.000.000	1 Kebijakan	10.000.000	1 Kebijakan	10.000.000	1 Kebijakan	10.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi			1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] monitoring evaluasi dan Pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	jumlah Dok hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi			1 Lap	10.000.000	1 Lap	10.000.000	1 Lap	10.000.000	1 Lap	10.000.000	DP3A	
[ Kegiatan ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan anak	1 Dok	400.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	30.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dok	400.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kotasus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus			1 Dok	4.000.000	1 Dok	4.000.000	1 Dok	4.000.000	1 Dok	4.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus			1 Lembaga	4.000.000	1 Lembaga	4.000.000	1 Lembaga	4.000.000	1 Lembaga	4.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus			5 Org	4.000.000	5 Org	4.000.000	5 Org	4.000.000	9 Org	9.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)			1 Lembaga	4.000.000	1 Lembaga	4.000.000	1 Lembaga	4.000.000	1 Lembaga	4.000.000	DP3A	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Target dan Pagu Indikator Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		2026		2027		2028		2029		2030			
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
[ SUB Kegiatan ] monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus			1 Lap	4.000.000	1 Lap	4.000.000	1 Lap	4.000.000	1 Lap	4.000.000	DP3A	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>													
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> )	2,12	98.766.912	2,11	150.000.000	2,10	150.000.000	2,10	150.000.000	2,10	219.084.866	DP3A	
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19</i> )	17,78		17,69		17,61		17,61		17,61			
[ Kegiatan ] Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 Sektor	98.766.912	5 Sektor	150.000.000	5 Sektor	150.000.000	5 Sektor	150.000.000	5 Sektor	219.084.866	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	1 Dok	48.766.912	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	150.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	44.084.866	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi			1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	25.000.000	DP3A	
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi Modern / <i>Modern Contraceptive (mCPR)</i>	69	395.776.032	70	712.023.866	71	774.633.325	72	844.217.477	73	996.553.304	DP3A	
	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	79,09		79,91		80,75		81,6		82,47			
[ Kegiatan ] Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Ratio Akseptor KB	0,76	295.776.032	0,76	662.023.866	0,76	724.633.325	0,76	794.217.477	0,76	946.553.304	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dok	95.776.032	2 Dok	200.000.000	2 Dok	230.000.000	2 Dok	250.000.000	3 Dok	300.000.000	DP3A	



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Target dan Pagu Indikator Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		2026		2027		2028		2029		2030			
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
[ SUB Kegiatan ] Fasilitasi Kerjasama dengan Stakeholder dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Daerah	100.000.000	2 Daerah	200.000.000	2 Daerah	220.000.000	2 Daerah	250.000.000	3 Daerah	300.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Daerah	100.000.000	2 Daerah	262.023.866	2 Daerah	274.633.325	2 Daerah	294.217.477	3 Daerah	346.553.304	DP3A	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi dalam pengelolaan pembinaan kesertian ber-KB	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	27,24%	100.000.000	32,24%	50.000.000	37,24%	50.000.000	42,24%	50.000.000	42,24%	50.000.000	DP3A	
Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	2 Organisasi	100.000.000	1 Organisasi	50.000.000	1 Organisasi	50.000.000	1 Organisasi	50.000.000	1 Organisasi	50.000.000	DP3A	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase keluarga yang mengikuti kelompok Kegiatan ketahanan keluarga</b>	<b>79,50%</b>	<b>378.427.353</b>	<b>81%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>84%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>85%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>87,50%</b>	<b>225.000.000</b>	<b>DP3A</b>	
[ Kegiatan ] Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 Organisasi	125.000.000	4 Organisasi	70.000.000	4 Organisasi	70.000.000	4 Organisasi	70.000.000	4 Organisasi	70.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	3 Organisasi	125.000.000	2 Organisasi	70.000.000	2 Organisasi	70.000.000	2 Organisasi	70.000.000	2 Organisasi	70.000.000	DP3A	
[ Kegiatan ] Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi ke Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga	50%	253.427.353	60%	130.000.000	65%	130.000.000	70%	130.000.000	75%	155.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Fasilitasi Kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1 Lap	125.750.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	55.000.000	DP3A	
[ SUB Kegiatan ] Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)			1 Lap	20.000.000	1 Lap	20.000.000	1 Lap	20.000.000	1 Lap	25.000.000	DP3A	



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Target dan Pagu Indikator Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		2026		2027		2028		2029		2030			
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
[ SUB Kegiatan ] Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 Lap	127.677.353	1 Lap	60.000.000	1 Lap	60.000.000	1 Lap	60.000.000	1 Lap	75.000.000	DP3A	
<b>UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>			<b>1.326.421.694</b>		<b>1.701.421.695</b>		<b>2.156.482.830</b>		<b>2.673.787.291</b>		<b>3.478.417.714</b>		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90,79 Indeks	394.419.344	90,91 Indeks	1.326.421.695	91,09 Indeks	1.724.348.204	91,21 Indeks	2.241.652.665	91,45 Indeks	2.914.148.463	UPTD PPA	
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%		100%			
[ Kegiatan ] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dok	52.559.999	4 Dok	52.560.000	4 Dok	52.560.000	4 Dok	52.560.000	4 Dok	52.560.000		
(Sub Kegiatan) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dok	52.559.999	4 Dok	52.560.000	4 Dok	52.560.000	4 Dok	52.560.000	4 Dok	52.560.000	UPTD PPA	
[ Kegiatan ] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			8 Org	265.284.339	8 Org	344.869.644	8 Org	448.330.533	8 Org	582.829.695	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			22 Paket	88.428.113	24 Paket	114.956.548	26 Paket	149.443.511	28 Paket	194.276.565	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 Dok	88.428.113	1 Dok	114.956.548	1 Dok	149.443.511	1 Dok	194.276.565	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			4 Org	88.428.113	4 Org	114.956.548	4 Org	149.443.511	4 Org	194.276.565	UPTD PPA	
[ Kegiatan ] Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik			40 Unit	265.284.339	40 Unit	344.869.640	40 Unit	448.330.533	40 Unit	582.829.692	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	44.214.059	2 Paket	57.478.275	2 Paket	74.721.758	2 Paket	97.138.282	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4 Paket	44.214.056	4 Paket	57.478.273	4 Paket	74.721.755	4 Paket	97.138.282	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	44.214.056	1 Paket	57.478.273	1 Paket	74.721.755	1 Paket	97.138.282	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			1 Lap	44.214.056	1 Lap	57.478.273	1 Lap	74.721.755	1 Lap	97.138.282	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Lap	44.214.056	1 Lap	57.478.273	1 Lap	74.721.755	1 Lap	97.138.282	UPTD PPA	



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Target dan Pagu Indikator Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		2026		2027		2028		2029		2030			
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(Sub Kegiatan) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dok	44.214.056	1 Dok	57.478.273	1 Dok	74.721.755	1 Dok	97.138.282	UPTD PPA	
[ Kegiatan ] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			20 Unit	212.724.339	20 Unit	292.309.640	20 Unit	395.770.533	20 Unit	530.269.692	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	172.434.820	1 Unit	224.165.267	1 Unit	291.414.846	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			20 Unit	212.724.339	20 Unit	119.874.820	20 Unit	171.605.266	20 Unit	238.854.846	UPTD PPA	
[ Kegiatan ] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2 jenis jasa	257.867.345	2 Jenis Jasa	265.284.339	2 Jenis Jasa	344.869.640	2 Jenis Jasa	448.430.533	2 Jenis Jasa	582.829.692	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Lap	132.642.170	1 Lap	172.434.820	1 Lap	224.165.267	1 Lap	291.414.846	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	257.867.345	1 Lap	132.642.169	1 Lap	172.434.820	1 Lap	224.265.266	1 Lap	291.414.846	UPTD PPA	
[ Kegiatan ] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	1 Unit	83.992.000	32 Unit	265.284.339	33 Unit	344.869.640	34 Unit	448.230.533	35 Unit	582.829.692	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			10 Unit	88.428.113	11 Unit	114.956.548	12 Unit	149.443.511	13 Unit	194.276.564	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	83.992.000	20 Unit	88.428.113	20 Unit	114.956.546	20 Unit	149.443.511	20 Unit	194.276.564	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	88.428.113	2 Unit	114.956.546	2 Unit	149.343.511	2 Unit	194.276.564	UPTD PPA	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</b>	<b>100%</b>	<b>466.436.420</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>UPTD PPA</b>	
[ Kegiatan ] Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan UPTD	43 Org	466.436.420	46 Org	250.000.000	49 Org	300.000.000	52 Org	300.000.000	55 Org	300.000.000	UPTD PPA	



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Target dan Pagu Indikator Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		2026		2027		2028		2029		2030			
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(Sub Kegiatan) layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Org	16.025.000	4 Org	25.000.000	6 Org	30.000.000	6 Org	30.000.000	6 Org	30.000.000	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Org	40.800.000	8 Org	25.000.000	8 Org	30.000.000	8 Org	30.000.000	8 Org	30.000.000	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Org	164.650.000	30 Org	50.000.000	30 Org	60.000.000	30 Org	60.000.000	30 Org	60.000.000	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Org	17.500.000	3 Org	15.000.000	4 Org	18.000.000	4 Org	18.000.000	4 Org	18.000.000	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Org	50.617.567	11 Org	37.500.000	11 Org	45.000.000	11 Org	45.000.000	11 Org	45.000.000	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Org	108.570.000	30 Org	45.000.000	30 Org	54.000.000	30 Org	54.000.000	30 Org	54.000.000	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Org	47.122.028	2 Org	37.500.000	3 Org	45.000.000	3 Org	45.000.000	3 Org	45.000.000	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Org	21.151.825	3 Org	15.000.000	3 Org	18.000.000	3 Org	18.000.000	3 Org	18.000.000	UPTD PPA	



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Target dan Pagu Indikator Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		2026		2027		2028		2029		2030			
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Indikator UPTD PPA)</b>	<b>100%</b>	<b>465.565.930</b>	<b>100%</b>	<b>125.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>132.134.626</b>	<b>100%</b>	<b>132.134.626</b>	<b>100%</b>	<b>264.269.251</b>	<b>UPTD PPA</b>	
[ Kegiatan ] Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus	43 layanan	465.565.930	46 layanan	125.000.000	49 layanan	132.134.626	52 layanan	132.134.626	55 layanan	264.269.251	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Org	155.050.000	30 Org	25.000.000	30 Org	26.426.920	30 Org	26.426.920	30 Org	52.853.849	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Org	15.000.000	2 Org	7.500.000	2 Org	7.928.075	2 Org	7.928.075	2 Org	15.856.154	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Org	108.570.000	30 Org	22.500.000	30 Org	23.784.252	30 Org	23.784.252	30 Org	47.568.472	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Org	60.600.000	8 Org	12.500.000	8 Org	13.213.460	8 Org	13.213.460	8 Org	26.426.924	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Org	11.182.000	2 Org	12.500.000	2 Org	13.213.460	2 Org	13.213.460	2 Org	26.426.924	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Org	16.320.975	3 Org	7.500.000	3 Org	7.928.075	3 Org	7.928.075	3 Org	15.856.154	UPTD PPA	
(Sub Kegiatan) layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Org	47.448.132	2 Org	18.750.000	2 Org	19.820.192	2 Org	19.820.192	2 Org	39.640.387	UPTD PPA	



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Target dan Pagu Indikator Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		2026		2027		2028		2029		2030			
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(Sub Kegiatan) layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	10 Org	51.394.823	10 Org	18.750.000	10 Org	19.820.192	10 Org	19.820.192	10 Org	39.640.387	UPTD PPA	



#### IV.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam menetapkan program-program tersebut terdapat program prioritas yang diselenggarakan oleh DPPPA Provinsi Kaltim yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah yaitu pada **“Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender”** pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan tertera pada Tabel di bawah ini :

Tabel 4.3  
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Pemberdayaan Perempuan dan Pegasusutamaan Gender	Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	(Kegiatan) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	
			[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	
			[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	
			[ SUB KEGIATAN ] pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
			[ SUB KEGIATAN ] sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
			[ SUB KEGIATAN ] peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	



Program DPPPA Provinsi Kaltim di atas menjadi Program Prioritas dengan 2 (dua) indikator yaitu Proporsi Perempuan dalam Kepemimpinan dan Manajemen dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan dengan target 5 kerja tahunan pada table di bawah ini :

Tabel 4.4  
Target Program Prioritas DPPPA Prov. Kaltim

Program Prioritas	Indikator	Baseline 2024	Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Proporsi Perempuan dalam Kepemimpinan dan Manajemen	N/A	45,11 %	45,92 %	46,94 %	48,17 %	49,63 %	54,67 %
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	49,07 %	49,65 - 50,83 %	50,20 - 51,26 %	50,75 - 51,69 %	51,30 - 52,11 %	51,86 - 52,54 %	52,41 - 52,97 %

#### IV.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Indikator kinerja utama DPPPPA Provinsi Kaltim tahun 2025-2029 secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut ini.



Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,46	87,48	87,50	87,51	87,60	87,65	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,426	0,414	0,402	0,390	0,378	0,366	
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,09	68,15	70,20	71,49	72,86	74,22	
4	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	77,46	78,33	78,89	79,45	79,96	80,52	
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	76,00	76,25	76,50	76,75	77,00	77,25	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50	

#### **IV.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA DAERAH INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)**

IKK sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi bagian integral dari sistem perencanaan dan evaluasi kinerja dan tertuang dalam berbagai regulasi, termasuk Permendagri No. 86 Tahun 2017. Indikator kinerja Kunci (IKK) Provinsi Kaltim dan target setiap tahun mulai 2025



sampai dengan 2030 pada urusan yang diampu Dinas PPPA Provinsi Kaltim disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPPPA Provinsi Kaltim Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Kunci (IKD)	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Indikatif						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>A</b>	<b>URUSAN PPPA</b>									
1	Persentase anggaran responsif gender (ARG)	%	28,67	29	30	35	40	45	50	Kemterian PPPA RI
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	99	100	100	100	100	100	100%	Kemterian PPPA RI
3	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Lembaga	9	10	12	14	16	18	20	Kemterian PPPA RI
4	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	99	100	100	100	100	100	100%	Kemterian PPPA RI
<b>B</b>	<b>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>									
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Absolute	2,17	2,14	2,12	2,11	2,1	2,1	2,1	Kemenduk bangsa
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility)/ASFR 15-19	Absolute	18,2	17,95	17,78	17,69	17,61	17,61	17,61	Kemenduk bangsa
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	21,91	21	20	19	19	18	17	Kemenduk bangsa
4	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	%	77,37	78,28	79,09	79,91	80,75	81,6	82,47	Kemenduk bangsa
5	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Indeks	90,06	90,57	91,04	91,5	91,93	92,34	92,83	Kemenduk bangsa
6	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	57,85	57,98	58,1	58,22	58,35	58,47	58,68	Kemenduk bangsa
7	Presentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	17,24	22,24	27,24	32,24	37,24	42,24	47,24	Kemenduk bangsa
8	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	67,8	68,25	68,69	69,12	69,54	69,95	70,35	Kemenduk bangsa
9	Presentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	15,01	14,51	14,03	13,54	13,05	12,56	12,07	Kemenduk bangsa

## BAB V

### PENUTUP



Masa berlaku Renstra DPPPA Provinsi Kaltim adalah selama 5 (lima) tahun yakni Tahun 2025-2029. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dalam dokumen perencanaan, untuk DPPPA Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah.

Beberapa kaidah pelaksanaan DPPPA Provinsi Kaltim adalah selama lima tahun yakni Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang serta UPTD pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang serta UPTD pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Samarinda, 7 November 2025

Kepala Dinas,



*[Handwritten Signature]*  
M. Nani Sorayalita, SE, MMT

Pemina Utama Madya

NIP. 19651215 198601 2 002

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

JALAN DEWI SARTIKA NO. 13 TELP. (0541) 747481  
SAMARINDA -75242

# LAMPIRAN





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

JALAN DEWI SARTIKA NOMOR 13 TELP. (0541) 747481 Fax. (0541) 741405

e-mail : [dkp3a.provkaltim@gmail.com](mailto:dkp3a.provkaltim@gmail.com)

SAMARINDA 75117

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR SK.001.02/DKP3A-I/II/2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DILINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2025-2029**

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan (2), Pasal 121 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD dilakukan bersamaan dengan penyusunan awal RPJMD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas.
- c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam kesekretariatan dimaksud ;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota, yang menggantikan peraturan sebelumnya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI no 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

- Kesatu** : Membentuk Tim Penyusunan Renstra dilingkungan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kedua** : Penyusunan Renstra dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- Penyusunan rancangan keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim penyusunan renstra DP3A
  - Penyusunan Agenda dan rencana Kerja Tim Penyusunan Resntra DP3A
  - Melakukan Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan pembangunan daerah Berdasarkan Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SIPPD)
  - Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Awal dan Rancangan Akhir Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
  - Menyiapkan Dokumen Renstra Final yang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Renstra tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- Keempat** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 3 Februari 2025

KEPALA,



**Hj. Noryani Sorayalita, S.E., MM**

Pembina Utama Muda

NIP.19651215 198601 2 002

Tembusan

- Gubernur Kalimantan Timur;
- Sekretaris Daerah Prov. Katim.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029**

**SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DILINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029**

- Pengarah** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
- K e t u a** : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris** : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota** : 1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak  
2. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan  
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
4. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga  
5. Kepala UPTD PPPA  
6. Kepala Sub Bagian Umum  
7. Staf Sub Bagian Perencanaan Program

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 3 Februari 2025

KEPALA,



**Hj. Noryani Sorayalita, S.E., MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651215 198601 2 002

**PANDUAN TARGET DAN FORMULASI TAHUN 2024-2030**  
**IKK / IKU / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET INDIKATIF						FORMULASI
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DP3A PROV. KALTIM</b>										
<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>										
	Persentase anggaran responsif gender (ARG)	%	28.67	29	30	35	40	45	50	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD / Jumlah seluruh belanja operasional & modal APBD x 100
	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	99	100	100	100	100	100	100	Jumlah laporan/kasus yang masuk = Jumlah layanan yang diberikan
	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Lembaga	9	10	12	14	16	18	20	Bersifat akumulatif dari capaian 2024 sampai dengan tahun 2030
	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	99	100	100	100	100	100	100	Jumlah laporan/kasus yang masuk = Jumlah layanan yang diberikan
<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>										
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Absolute	2.17	2.14	2.12	2.11	2.1	2.1	2.1	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total  ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur  bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu  pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun  i = kelompok umur;  i = 1 = untuk kelompok umur 15-19,  i = 2 = untuk kelompok umur 20-24,...sd  i = 7 = untuk kelompok Umur 45-49  K = Bilangan Konstanta biasanya 1000</p>
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility)/ASFR 15-19	Absolute	18.2	17.95	17.78	17.69	17.61	17.61	17.61	$ASFR_i = \frac{b_i}{(p_i \wedge f)} \times k$ <p>Jumlah Peserta KB Aktif Modern / Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%</p>

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET INDIKATIF						FORMULASI
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	21.91	21	20	19	19	18	17	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani / Jumlah pasangan usia subur x 100
	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	%	77.37	78.28	79.09	79.91	80.75	81.6	82.47	Jumlah PUS yang ingin ber KB dan terlayani / Jumlah PUS x 100%
	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Indeks	90.06	90.57	91.04	91.5	91.93	92.34	92.83	$\sum_{i=1}^8 (w_i V_i)$
	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	57.85	57.98	58.1	58.22	58.35	58.47	58.68	$\sum_{i=1}^7 (w_i D_i)$
	Presentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	17.24	22.24	27.24	32.24	37.24	42.24	47.24	$\frac{\text{jumlah kampung KB dengan kategori Mandiri dan Berkelanjutan}}{\text{jumlah desa di suatu wilayah}} \times 100\%$
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	67.8	68.25	68.69	69.12	69.54	69.95	70.35	$\sqrt[5]{D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4 \times D_5}$
	Presentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	15.01	14.51	14.03	13.54	13.05	12.56	12.07	$\frac{\text{jumlah ibu hamil yang tidak ingin anak lagi dan yang ingin hamil nanti}}{\text{jumlah ibu hamil di tahun berjalan}} \times 100\%$
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DP3A PROV. KALTIM</b>										
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87.46	87.47	87.48	87.50	87.51	87.60	87.65	Proyeksi penetapan target berdasarkan tren pada capaian indikator tersebut
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.441	0.426	0.414	0.402	0.390	0,378	0.366	Proyeksi penetapan target berdasarkan tren pada capaian indikator tersebut
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64.04	66.09	68.15	70.20	71.49	72.86	74.22	Target ditetapkan oleh Kementerian PPA
	Indeks Pembangunan Keluarga Berkualitas (IPBK)	Indeks	74.32	74.32	77.46	78.33	79.45	79.96	80.52	Indeks Baru dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71.9	76.00	76.25	76.50	76.75	77.00	77.25	LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90.88	91.00	91.50	92.00	92.50	93.00	93.50	IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang Terisi x Nilai Penimbang
<b>TUJUAN DP3A PROV. KALTIM</b>										
<b>Tujuan:</b> Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87.46	87.47	87.48	87.50	87.51	87.60	87.65	Proyeksi penetapan target berdasarkan tren pada capaian indikator tersebut
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.441	0.426	0.414	0.402	0.390	0,378	0.366	Proyeksi penetapan target berdasarkan tren pada capaian indikator tersebut
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64.04	66.09	68.15	70.20	71.49	72.86	74.22	Target ditetapkan oleh Kementerian PPA

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET INDIKATIF						FORMULASI
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	74.32	77.46	78.33	78.89	79.45	79.96	80.52	Indeks Baru dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
<b>SASARAN DP3A PROV. KALTIM</b>										
<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya partisipasi dan Kapasitas perempuan dalam bidang sosial budaya, politik, hukum dan ekonomi	Proporsi perempuan dalam kepemimpinan dan manajerial	%	44.09	45.11	45.92	46.94	48.17	49.63	54.67	Proyeksi Persentase Perempuan dalam Kepemimpinan dan Manajemen / Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Prov.Kaltim X 100
<b>Sasaran 2 :</b> Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Ratio Kekerasan Terhadap Perempuan per 100.000 perempuan	Ratio	47.67	47.50	47.00	46.50	46.00	45.50	45.00	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan / Jumlah Penduduk perempuan x 100.000
	Ratio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 anak	Ratio	0.51	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45	Jumlah anak korban kekerasan yang dtangani Instansi Tingkat Provinsi yang didampingi/Jumlah anak X 10.000
<b>Sasaran 3 :</b> Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan Kab/Kota Layak Anak	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Bersifat akumulatif dari capaian 2024 sampai dengan tahun 2030
<b>Sasaran 4 :</b> Meningkatnya Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65.5%	67.2	68.9	70.6	72.3	74.00	74.80	Perhitungan Indeks Dimensi : Indeks untuk setiap dimensi dihitung menggunakan rumus berikut: Indeks Dimensi = (Skor Total Dimensi - Skor Minimal) / (Skor Maksimal - Skor Minimal) x 100. dan Penghitungan iBangga Komposit : iBangga merupakan nilai gabungan atau komposit yang dihitung dari rata-rata aritmetik ketiga indeks dimensi: iBangga = (Indeks Kemandirian + Indeks Ketentraman + Indeks Kebahagiaan) / 3.
<b>Sasaran 5 :</b> Terpenuhinya layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	Persentase layanan perlindungan perempuan dan anak secara cepat akurat dan komprehensif	%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah laporan/kasus yang masuk = Jumlah layanan yang diberikan
<b>Sasaran 6:</b> Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71.9	76.00	76.25	76.50	76.75	77.00	77.25	Komponen Penilaian (mengacu pada Permenpan RB No. 88/2021): 1. Perencanaan Kinerja (30%) – keselarasan antara dokumen perencanaan, indikator, dan sasaran strategis. 2. Pengukuran Kinerja (25%) – keandalan dan konsistensi pengukuran capaian indikator kinerja. 3. Pelaporan Kinerja (15%) – ketepatan, kualitas, dan keterpaduan laporan kinerja. 4. Evaluasi Internal Kinerja (10%) – pelaksanaan, tindak lanjut, dan pemanfaatan hasil evaluasi internal. 5. Capaian Kinerja dan Efisiensi Anggaran (20%) – hasil yang diperoleh terhadap penggunaan sumber daya.

PROGRAM DP3A PROV. KALTIM										
URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET INDIKATIF						FORMULASI
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
[Program] Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Proporsi Perempuan dalam Kepemimpinan dan Manajerial	%	44.09	45.11	45.92	46.94	48.17	49.63	54.67	Proyeksi Persentase Perempuan dalam Kepemimpinan dan Manajemen / Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Prov.Kaltim X 100
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	49.07	49,65 -	50,20 -	50,75 -	51,30 -	51,86 -	52,41 -	TPAK Perempuan = Jumlah Angkatan Kerja Perempuan /Jumlah Penduduk Usia Kerja Perempuan x 100
[Program] Perlindungan Perempuan	Ratio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Ratio	47,67	47,50	47,00	46,50	46,00	45,50	45,00	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan / Jumlah Penduduk perempuan x 100.000
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Indikator UPTD PPA)	%	99	100	100	100	100	100	100	Jumlah laporan/kasus yang masuk = Jumlah layanan yang diberikan
[Program] Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah data yang diminta/Jumlah data yang diberikan x 100
[Program] Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	60,47 (2023)	61,00	61,5	62,00	62,5	63,00	63,5	Target ditetapkan oleh Kementerian PPA
[Program] Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Indikator UPTD PPA)	%	99	100	100	100	100	100	100	Jumlah laporan/kasus yang masuk = Jumlah layanan yang diberikan
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	79,71	82,00	84,00	88,00	92,00	96,00	100	Target ditetapkan oleh Kementerian PPA
[Program] Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2.17	2.14	2.12	2.11	2.10	2.10	2.10	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun i = kelompok umur; i = 1 = untuk kelompok umur 15-19, i = 2 = untuk kelompok umur 20-24,....sd i = 7 = untuk kelompok Umur 45-49 K = Bilangan Konstanta biasanya 1000

	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	18,20	17,95	17,78	17,69	17,61	17,61	17,61	$ASFR_i = b_i / (p_i^{\wedge}) \times K$
[Program] pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR)	%	57.10	68.42	69.00	70.00	71.00	72.00	73.00	Jumlah peserta KB aktif modern / Jumlah pasangan usia subur x 100
	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	%	77.37	78.28	79.09	79.91	80.75	81.60	82.47	Jumlah PUS yang ingin ber KB dan terlayani / Jumlah PUS x 100
URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET INDIKATIF						FORMULASI
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
[Program] Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	74.50	77.00	79.50	81.00	84.00	85.00	87.50	Indikator baru dari Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
[Program] Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berprespektif gender dan hak anak sesuai standar	Lembaga	9	10	12	14	16	18	20	Bersifat akumulatif dari capaian 2024 sampai dengan tahun 2030
[Program] Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	90,88	91.00	91.20	91.40	91.60	91.80	92.00	Indeks Kualitas ini dihitung berdasarkan Persentase dokumen perencanaan anggaran yang tepat waktu, persentase realisasi anggaran, persentase SDM yang mengikuti Diklat dan persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	85.00	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	91.00	Berdasarkan hasil survey Responden terhadap Kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan dan dilihat dari beberapa indikator dalam SKM
[Program] Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD PPPA)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak)	Indeks	90,67	-	90,79	90,91	91,09	91,21	91,45	Indeks Kualitas ini dihitung berdasarkan Persentase dokumen perencanaan anggaran yang tepat waktu, persentase realisasi anggaran, persentase SDM yang mengikuti Diklat dan persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak)	%	100	100	100	100	100	100	100	Berdasarkan hasil survey Responden terhadap Kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan dan dilihat dari beberapa indikator dalam SKM, namun pada UPTD bahwa Jumlah Laporan = dengan Jumlah yang dilayani